

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH LKjPD 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2025, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 27 Februari 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ANDI IRMAN, S.STP.,MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19771212 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

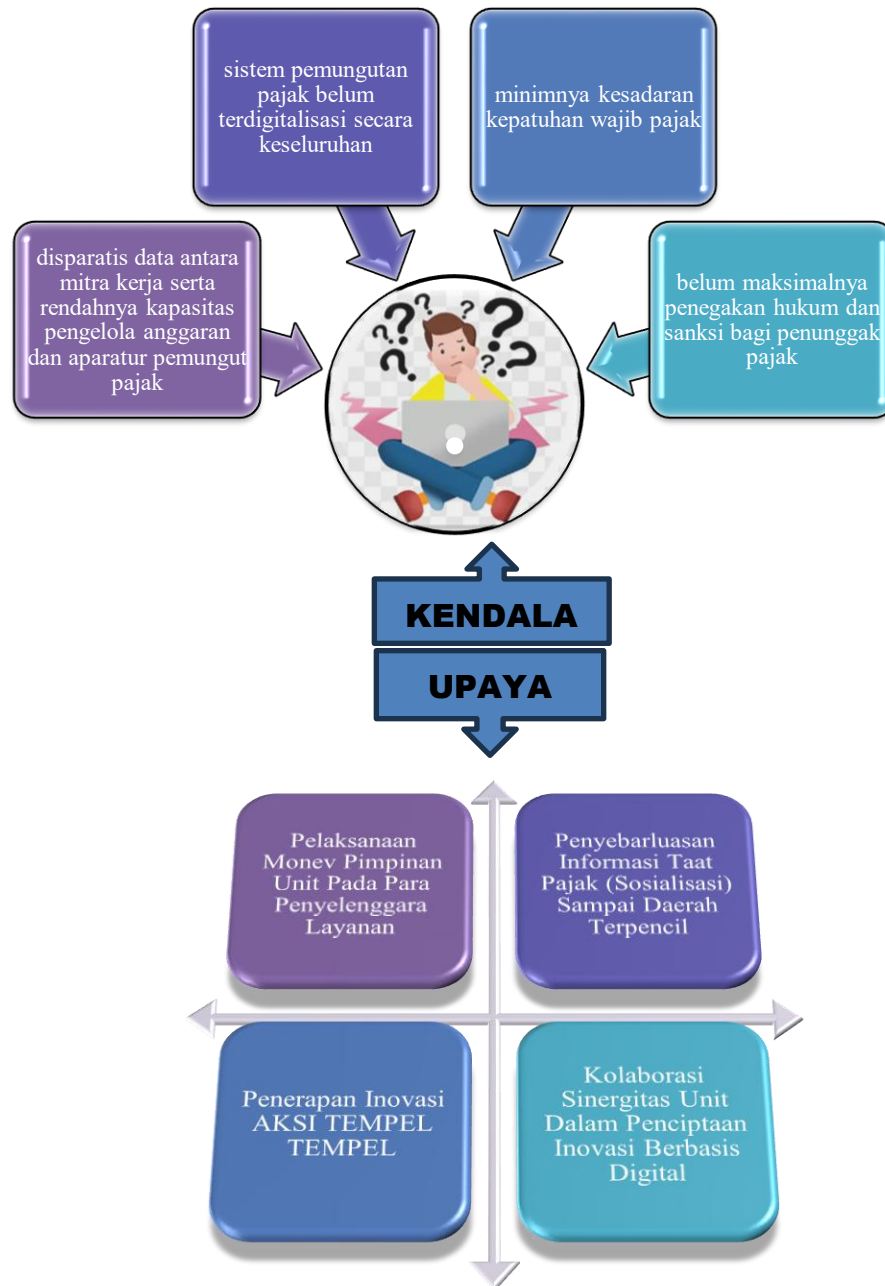
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama Tahun 2025. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terjabar dalam **Misi ke 2** yaitu: **“Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”**, dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Misi ke 2 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan Rencana Strategis, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien.

Sedangkan Sasaran Strategis Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Menigkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan. Dengan realisasi menunjukkan persentase sebesar 41,62 % dan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 38,79 % sehingga Rasio Capaian Kinerjanya sebesar 107.30 %

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 117.212.094.460,51** yang terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp Rp 107.663.895.309,00** atau **91,85 %**. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala dan kelemahan sehingga Bapenda terus melakukan beberapa program dalam upaya penyelesaiannya seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



a. Kendala dan Kelemahan

- 1) Terdapat disparitas data antara mitra kerja dalam penatausahaan data kendaraan bermotor serta rendahnya kapasitas pengelola anggaran dan aparatur pemungut pajak dalam hal teknis pengelolaan, manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Sistem Pemungutan Pajak yang belum terdigitalisasi secara penuh atau manual, menghambat kecepatan dan transparansi pelayanan
- 3) Masih minimnya kepatuhan wajib pajak dalam penundaan pembayaran dan atau adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dimana wajib

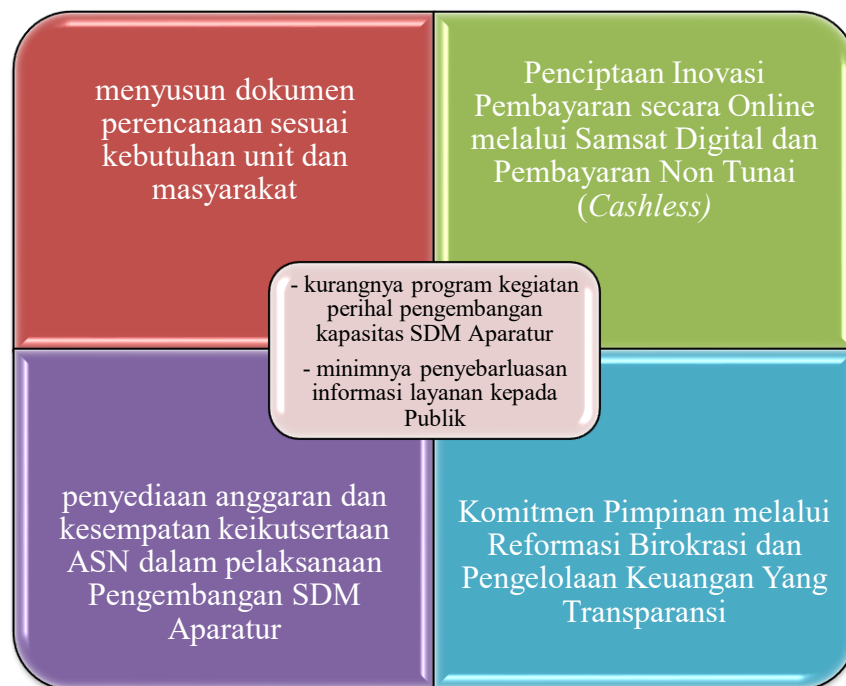
pajak merasa tidak mendapatkan timbal balik pelayanan publik secara langsung

- 4) Penegakan hukum dan sanksi bagi penunggak pajak atau retribusi yang belum maksimal

b. Upaya yang Telah dilaksanakan

- 1) Pimpinan unit rutin melakukan monitoring dan evaluasi para penyelenggara layanan dalam upaya membenahan manajemen pengelolaan pajak, pendataan ulang wajib pajak dan perluasan objek pajak
- 2) Penerapan inovasi Aksi Tempel-Tempel (ATT) dalam upaya menertibkan wajib pajak yang tidak patuh sebagai bentuk peringatan langsung, sanksi sosial dan moral, transparansi kepada publik, penertiban dan pengamanan PAD serta menjadi Media Edukasi
- 3) Sosialisasi yang massif hingga kedaerah terpencil, dengan memanfaatkan media sosial maupun media cetak untuk meningkatkan pemahaman kepada wajib pajak
- 4) Adanya sinergi yang baik dengan mitra kerja sehingga mampu menciptakan inovasi baru yang mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



a. Kendala dan Kelemahan

- 1) Masih kurangnya program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang di era digitalisasi masa kini.
- 2) Kurangnya sosialisasi dalam upaya penyebaran informasi publik dari pemerintah yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat

b. Upaya yang Telah dilaksanakan

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan yang hampir tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan unit kerja
- 2) Penyediaan anggaran dan kesempatan para aparatur untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
- 3) Adanya inovasi pembayaran pajak daerah secara online, memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tatap muka dengan petugas.
- 4) Adanya Komitmen Pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan

Dengan adanya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ANDI IRMAN, S.STP.,MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19771212 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1.3. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN	28
1.4. TINDAK LANJUT LHE AKIP	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Error! Bookmark not defined.32
2.2. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	49
2.5. PERJANJIAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1 CAPAIAN KINERJA	56
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.....	58
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024	57
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	63
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	64
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	68
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	72
g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	70
3.2 REALISASI ANGGARAN	94
3.3 INOVASI	104
3.3 PENGHARGAAN	92
BAB IV PENUTUP	93
Lampiran	
- Lain-lain yang Dianggap Perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan PNS dan PPPK	2
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	2
Tabel 1.3.	Sarana dan Prasarana	3
Tabel 1.4.	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	30
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Renstra 2021-2025	33
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Renstra 2025-2029	34
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	34
Tabel 2.3.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	38
Tabel 2.4.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	41
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026	49
Tabel 2.6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	50
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	52
Tabel 2.8.	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	55

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	59
Tabel 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	60
Tabel 3.3.	Realisasi Penerimaan Daerah	61
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi PAD	62
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025	65
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Di Renstra	67
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	68
Tabel 3.8.	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	74
Tabel 3.9.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	75
Tabel 3.10.	Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Sumber Dana APBD	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal.
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	21
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu “Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain”.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- b. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan terkait pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis terkait Pajak Daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
- e. Penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- i. Penyusunan target dan realisasi realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Keadaan Pegawai Organik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan berjumlah 517 (Limat ratus tujuh belas) orang yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) orang pejabat struktural dan 449 (empat ratus empat puluh sembilan) orang jabatan pelaksana serta 4 (empat) orang jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan 2 (dua) orang Perencana dengan kualifikasi pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan PNS dan PPPK

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
1.	II	38	15	52
2.	III	84	89	173
3.	IV	13	18	31
4.	V	47	26	68
5.	VI	98	89	144
Total		280	237	517

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
1.	SD-SMA	94	45	139
2.	Dilpma	1	4	5
3.	S1	167	166	333
4.	S2	17	22	39
5.	S3	-	1	1
Total		279	238	517

Berdasarkan gambaran jumlah pegawai sebagaimana diuraikan di atas, secara kuantitatif sumber daya manusia aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup memadai dalam mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana

No.	Sarana Prasarana	Unit	Ket
1.	Tanah Bangunan Kantor	7.078 m ²²	KIB A
2.	Bangunan (Gedung)	8 Unit	KIB C
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	17 Unit	KIB B
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	45 Unit	KIB B
5.	Barang lainnya	1.424 Unit	KIB B DAN KIB D

Dengan adanya perlengkapan sarana dan prasarana penunjang sangat membantu mobilitas guna terwujudnya capaian kinerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi Badan Daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dengan kotak jabatan yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan membawahi :
 - a. Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Infrastruktur
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapat Daerah
 - b. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. UPT Badan.

Berdasarkan jenis jabatannya, jabatan fungsional menjadi bertambah karena dipengaruhi oleh adanya penyetaraan jabatan sekitar 6 (enam) orang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022, dimana sebanyak 6 (enam) orang pejabat Eselon IV telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 5 orang dan Perencana Ahli Muda sebanyak 2 Orang.

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Daerah;

II. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

III. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pelayanan Pajak Daerah, Pelayanan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain ;

- e. penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- i. penyusunan target dan realisasi penerimaan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Pajak membawahi:

1. Sub Bidang Pajak Daerah

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pajak Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pajak Daerah ;
- b. memfasilitasi Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian Pajak Daerah;
- c. melaksanakan Penelitian dan verifikasi Data pelaporan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah;
- e. melaksanakan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pemungutan pajak daerah;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan optimalisasi penerimaan PKB, BBN-KB, PAP, PAB dan opsen MBLB;

- i. menghimpun dan membuat laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan Pajak daerah serta pengembangannya;
- j. melaksanakan Penyusunan NJKB Pajak Daerah;
- k. melaksanakan pengawalan dan penghitungan terhadap pelaksanaan PBB-KB, PAJAK ROKOK dan Opsen Pajak MBLB;
- l. melakukan penghitungan dan penetapan target setiap tahun dan penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan seluruh UPT pendapatan setiap bulan ;
- m. melakukan dan menetapkan penghitungan target, lebih salur dan kurang salur atas DBH pajak daerah bagian kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah.

2. Sub. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain dengan perangkat daerah pemungut dan instansi terkait lainnya;
- c. menyusun data potensi, mengusulkan perubahan tarif dan mengkoordinasikan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. menginventarisasi sumber penerimaan lainnya;
- e. melakukan Pendataan dan pendaftaran objek Retribusi daerah;
- f. melakukan Pengelolaan data Retribusi daerah;
- g. melakukan Penetapan wajib Retribusi daerah dan Pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaporkan Pengelolaan Retribusi daerah;
- i. melaksanakan Sosialisasi dan konsultasi kebijakan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

- j. menghimpun usulan target penerimaan dan membuat laporan Realisasi penerimaan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- k. menyusun petunjuk pelaksanaan teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain serta penerimaan pendapatan hibah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

IV. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan sistim dan jaringan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional dia bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi ;
- b. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan Retribusi daerah serta memberikan analisa regulasi pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- e. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- f. pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak ;
- g. pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:

1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi

Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pelaporan Data dan Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan pelayanan dan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi pada pelaporan data dan Informasi;
- c. melakukan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
- d. melakukan pengolahan dan pemeliharaan sistem jaringan dan server jaringan;
- e. menyusun dan merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah pada pelaporan data dan Informasi;
- f. melakukan penyiapan, pengelolaan, pengembangan data dan informasi, pemeliharaan, pembinaan dan koordinasi dengan UPT Badan dan Unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan pelaporan data dan informasi;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang bidang teknologi dan sistem informasi pada pelaporan data dan informasi;

- h. membuat laporan, mengelola dan menganalisis serta mendokumentasikan data pendapatan daerah untuk disajikan dalam bentuk format laporan maupun bentuk informasi lainnya;
- i. melakukan Kerjasama dengan penyedia jasa (provider) telekomunikasi dan teknologi informasi;
- j. melakukan pengolahan data objek dan subjek pajak untuk verifikasi dan validasi data, baik secara administrasi maupun penelitian lapangan dan menyajikannya dalam berita acara;
- k. mengkoordinasikan hasil validasi data objek dan subjek pajak dengan pihak-pihak terkait dalam rangka updating data;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi.

2. Sub. Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi

Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- b. melakukan pengembangan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi pengolahan data elektronik, dan penyajian informasi Publik;
- c. melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di setiap UPT Badan dan Unit kerja terkait dengan pelaksanaan infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi, verifikasi, validasi objek dan subjek data;
- d. menyiapkan Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. menangani laporan pengaduan dan mengkoordinasikan serta menindaklanjuti pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi dan pengolahan data;
- f. melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi;
- g. melakukan koordinasi pengamanan sistem database dan pemutakhiran database dengan menggunakan data yang bersumber dari Sub Bidang Pelaporan data dan Informasi;
- h. melakukan backup database pada data center dan pengecekan terhadap backup database pada setiap UPT Badan;
- i. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan arus data, integrasi data, pertukaran informasi dan instansi terkait;
- j. membuat strategi pengelolaan perangkat lunak aplikasi yang holistic spesifikasi dan struktur dari sistem basis data, terpadu dan terintegrasi;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi.

V. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah dan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan melakukan analisis regulasi dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan Retribusi daerah, dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan Retribusi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Data membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan pendapatan daerah;
- c. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
- e. menyusun perencanaan dan inovasi dalam rangka pengembangan potensi Pajak daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain
- f. menyusun perencanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penerimaan DBH Pajak Daerah dan optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Daerah;
- g. menyusun Perencanaan kegiatan sinergitas pemungutan opsen Pajak Daerah;
- h. melakukan Konsultasi kebijakan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- i. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan target dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap triwulan dan tahunan;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan dengan pihak dan unit terkait;
- k. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah ;

- b. melakukan penggalian dan pemetaan potensi pendapatan yang menjadi sumber pendapatan daerah;
- c. melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- d. melakukan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah;
- e. melakukan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
- f. melakukan Analisa dan pengembangan Pendapatan lain-lain serta penyusunan kebijakan Pendapatan Lain-lain;
- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat; Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- h. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan lain-lain kepada masyarakat;
- i. menyiapkan bahan evaluasi/Fasilitasi rancangan peraturan daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. melakukan koordinasi, konsultasi pengembangan potensi dengan instansi terkait dan menyusun Produk Hukum Daerah di bidang pendapatan daerah;
- k. menyusun dan merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi dan penataan kerjasama yang terkait dengan Pendapatan daerah;
- m. merumuskan dan menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat.

VI. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas Pelaksanaan perumusan kebijakan, Pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan

tugas pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi intensifikasi Pajak daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan Evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan Retribusi daerah kepada masyarakat pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;

- i. pelaksanaan Pemeriksaan pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistim Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistim Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:

1. Sub. Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja kegiatan sub bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian pemeriksaan, monitoring dan Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan pelayanan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain lainlain;
- e. melaksanakan monitoring, sinkronisasi regulasi pendapatan dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. melakukan pemeriksaan pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- h. melakukan pembinaan, pengendalian dan pemeriksaan menyangkut keuangan, aset dan personil pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dan UPT Badan;
- i. menindaklanjuti hasil temuan internal dan eksternal laporan wajib pajak dan aduan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pengawasan dan pengendalian sistim Administrasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pengendalian sistim Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi daerah;
- d. melakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan teknis sistim administrasi atas distribusi dan penggunaan dokumen pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan daerah yang berbasis teknologi;
- f. melakukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan sistim administrasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- i. melakukan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan dan monitoring;
- j. melakukan Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- k. melakukan pemberdayaan tugas dan fungsi PPNS dalam rangka penegakan hukum/ pengendalian pemungutan.
- l. meneliti kebenaran tata cara penggunaan dan pengisian dokumen administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah.

VII.. Kelompok Jabatan Fungsional

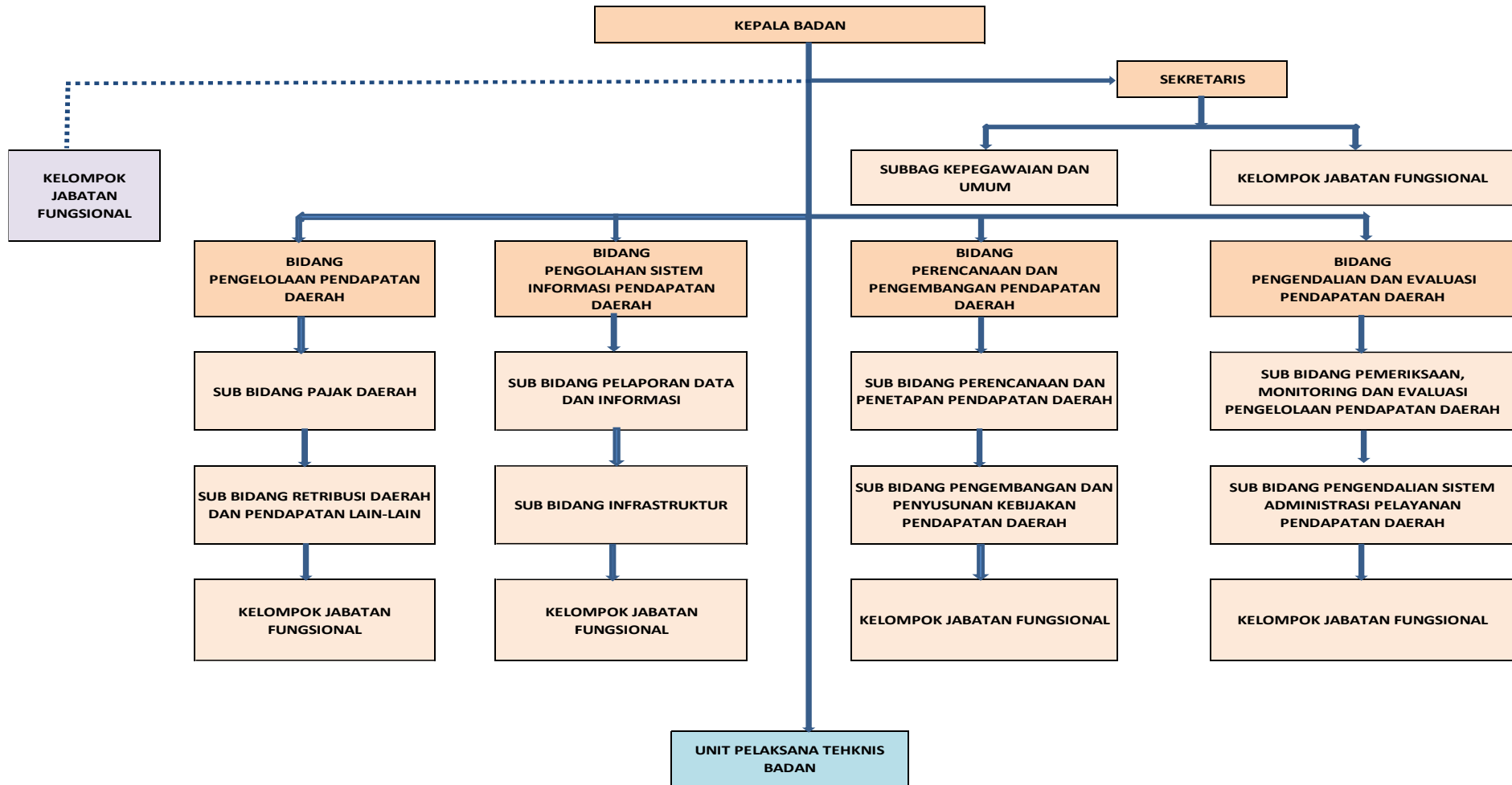
Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diturunkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dan Peraturan Gubernur Sulawesi-Tengah.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- c. Pemberian Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- d. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua tim; dan b. Anggota tim.

- e. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.\
- f. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, maka UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. UPT Pendapatan Wilayah I Kota Palu;
2. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong;
3. UPT Pendapatan Wilayah III Poso;
4. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali;
5. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai;
6. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan;
7. UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli;
8. UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol;
9. UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Unauna;
10. UPT Pendapatan Wilayah X Banawa;
11. UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi;
12. UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara;
13. UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut.

Dalam pelaksanaannya UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara dan UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut masih dalam proses pembentukan.

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh 7 (tujuh) Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, 2 (dua) SAMSAT Corner dan 1 (satu) SAMSAT Digital, yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya;
2. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonodale;
3. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili;
4. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan;

5. UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Lempe; dan
6. UPT Pendapatan Wilayah X Donggala Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe;
7. SAMSAT Point Wani
8. SAMSAT Corner Thamrin
9. SAMSAT Corner Songgolangi
10. SAMSAT Digital & Drive-Thru Bambaru

UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan, pelaksanaan kebijakan penetapan, penagihan dalam pelayanan pemungutan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas UPT Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan dan operasional teknis, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. pendistribusian tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan teknis operasional penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- d. pelaksanaan evaluasi tugas penatausahaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi teknis lainnya
- f. penataan pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota
- g. pelaporan pelaksanaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Usaha;
- c. Melakukan pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Pendapatan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARIS/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- e. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan;
- f. Membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
- g. Membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Pendapatan meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- h. Membuat laporan penerimaan Pajak Daerah secara umum;
- i. Membuat laporan material dan non material;
- j. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, dan

1. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan.

b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Seksi PKB dan BBN-KB, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ,penetapan, penagihan, pemungutan, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Uraian tugas Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Melaksanakan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah melalui mekanisme Samsat;
- e. Melaksanakan penagihan pajak daerah
- f. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
- g. Melakukan sosialisasi terkait pajak daerah;
- h. Melaksanakan proses keberatan dan permintaan / permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- i. Melaksanakan proses Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Mutasi Keluar Daerah Provinsi maupun Dalam Daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- j. Membuat laporan Penerimaan Pajak Daerah melalui mekanisme kesamsatan;
- k. Melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi;
- l. Melaksanakan proses permohonan perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya;
- m. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- n. Mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kerjasama dengan Kabupaten/Kota.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- p. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan

Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dalam pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan di luar kesamsatan yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kerjanya.

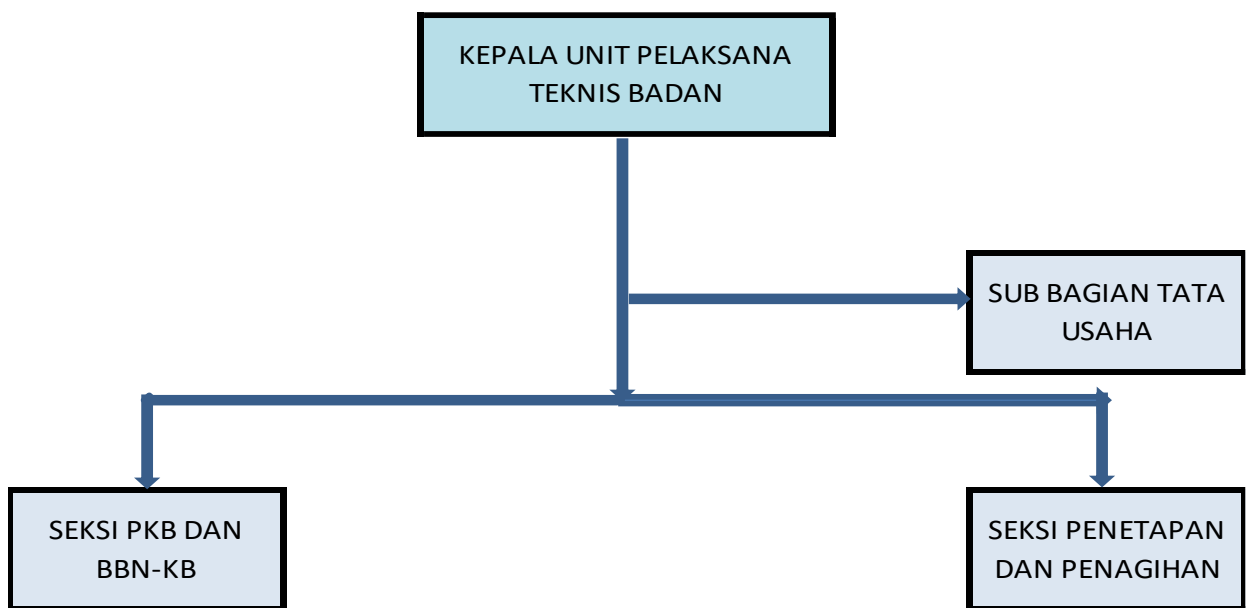
Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;
- c. Melakukan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
- e. Melakukan penetapan wajib pajak daerah;
- f. Melakukan sosialisasi pajak daerah;
- g. Menyampaikan SKPD, SKPDLB, SKPDKB, SSPD, STPD, PAP dan PAB;
- h. Melakukan kerjasama dengan Bapenda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- i. Melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan pajak yang menjadi target UPT Badan Pendapatan selain Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan Penataan Kendaraan dinas di lingkungan wilayah kerjanya;
- l. Membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluirun penerimaan pajak (kecuali Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),

- setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pajak daerah diluar kesamsatan yang sesuai kewengana UPT Pendapatan berdasarkan ketentuan pajak dan perturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - o. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

a. Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Penentuan Isu-Isu Strategis berdasarkan hasil review dari permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana layanan serta konektivitas antar daerah yang belum merata.
2. Kurangnya dukungan operasional dalam pengembangan potensi pendapatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik di daerah yang sulit menyebabkan masyarakat kurang membayar pajak.
4. Kurang Optimalnya data base potensi dan sumber pendapatan daerah.
5. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.
6. Prioritas Anggaran pada Pengelolaan Pendapatan belum optimal

b. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kewenangannya dalam bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, Pengelolaan Pajak Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, serta Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan dokumen RPJMD 2025-2029 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

1.4 TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.11.1./31/IRWIL.III/ITDA tanggal 7 Maret 2025, dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan :

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja (RENJA), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa nilai sebesar **76,90 %**, dengan predikat **“BB”**. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kinerja “memuaskan”, dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/sub koordinator.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 700.1.2.1/034//LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal : 21 MEI 2025 oleh Inspektorat Daerah, maka hasil tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Menyelaraskan kembali target IKU pada dokumen Renstra dan LKJiP.	Penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 dan LKJiP sudah di selaraskan dengan IKU. Berikut link <i>Google Drive</i> untuk dokumen Renstra 2025-2029 Bapenda https://drive.google.com/file/d/1Cr-tGCei1g0_6kkLPYzz_HU8x04Yx6ty/viiew?usp=sharing .
2.	Menyelaraskan kembali sasaran pada Renja yang disesuaikan kembali dengan Renstra.	Sudah menyelaraskan sasaran pada Renja yang disesuaikan kembali dengan Renstra. Berikut link <i>Google Drive</i> untuk dokumen Renja 2025 dan Renstra 2025-2029 Bapenda https://driv3e.google.com/drive/folders/1Tb1cBFZgX61T2tbdqiFxLtEhMegzGD2?usp=sharing .
3.	Membuat Kerangka Acuan Kerja untuk	Sudah membuat Kerangka Acuan Kerja

	mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	untuk mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Sebagai contoh KAK di Sekretariat Bapenda pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1CukbGXSfI-Y5N5zfnhi-LaAlRr1YJR?usp=sharing
4.	Mendokumentasikan kegiatan Pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan.	Sudah melakukan pendokumentasian kegiatan Pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan. https://drive.google.com/file/d/1uW_Tlkq3J6sa28EyTR1sJDo9SdZf9uOg/view?usp=sharing .
5.	Memberikan informasi hubungan kerja, Strategi, Kebijakan antar bidang atau perangkat daerah lainnya melalui <i>Crosscutting</i> .	Telah tergambarkan dalam aplikasi BERANI SELARAS https://drive.google.com/file/d/1SLCAWefkf-CQ_Ptu9RAmSwVvg2XdArcG/view?usp=sharing .
6.	Melakukan pemantauan atas Capaian Kinerja secara berjenjang.	Telah terakomodir di evaluasi RKPD pada BAPPEDA https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N-L9Prz6Sj3XX66xuoBU9gpHpZXa-Zfg/edit?usp=sharing&oid=104410841413763849860&rtpof=true&sd=true .
7.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.	Sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui website dari bkn untuk melakukan pengukuran kinerja, contohnya penyusunan SKP. https://drive.google.com/file/d/1tvIapAZuWocj1A-gVMZzNJ7c9iPNGXuj/view?usp=sharing .
8.	Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu : Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi.	Sudah dilaksanakan dalam setiap kegiatan, yang mana pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan. https://drive.google.com/file/d/1uW_Tlkq3J6sa28EyTR1sJDo9SdZf9uOg/view?usp=sharing .
9.	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan membuat Berita Acara hasil tindak lanjut rekomendasi LHE Akip sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Segera membuat Berita Acara Hasil tindak lanjut LHE Akip 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi, maka sesuai tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mendukung untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 Visi Gubernur Sulawesi Tengah adalah **“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029”** dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal.

Dalam menterjemahkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”**.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan rencana strategis, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien. Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatnya kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja, yaitu Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Renstra 2021-2026 (Tabel 4.1)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	31.30	32.04	32.78

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Renstra 2025-2029 (Tabel 3.1)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NSPK : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisiensi		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38,79	39,21	39,57	39,85	40,04	40,23
Sasaran : Meningkatkan Pendapatan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.58	8.40	12.30	11.90	11.67	11.52

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan berdasarkan unit kerja di BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Badan Pendapatan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub.kegiatan :
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pendataan dan Pendaftaran Objrk Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah

Melalui penerapan program-program khususnya di program penunjang, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan tentunya berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah dengan optimalisasi penerimaan pajak yang lebih baik. Dan juga program pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan, memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sulteng.

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,242,717,556.00	1,914,769,581.00	(327,947,975.00)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,242,717,556.00	1,914,769,581.00	(327,947,975.00)
		- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	198,702,350.00	98,301,000.00	(100,401,350.00)
		- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	249,815,100.00	226,056,300.00	226,056,300.00
		- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	211,331,100.00	104.976.550.00	04.976.550.00
		- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	57,463,561.00	122,502,000.00	65,038,439.00
		- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	267,722,950.00	191,592,650.00	(76,130,300.00)
		- Penetapan Wajib Pajak Daerah	437.137.662.000,0	451,642,500.00	14,504,838.00
		- Pelayanan dan Kosultasi Pajak Daerah	98,001,743.00	78,692,000.00	(19,309,743.00)
		- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114,612,676.00	327,312,676.00	212,700,000.00
		- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22,318,065.00	24,190,000.00	1,871,935.00
		- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	226,958,786.00	90,479,393.00	(136,479,393.00)
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	208,128,925.00	99,464,462.00	(108,664,463.00)		
- Elektronikfikasi Transaksi Pemerintah Daerah	150,000,300.00	99,560,050.00	(50,440,250.00)		
2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah I Palu			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,238,000,550.00	1,257,284,450.00	19,283,900.00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,238,000,550.00	1,257,284,450.00	19,283,900.00
		- Pendanaan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	862,552,000.00	940,260,000.00	77,708,000.00
		- Penagihan Pajak Daerah	375,448,550.00	317,024,450.00	(58,424,100.00)
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong			-
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	420.270.000,00	270,450,000.00	(149,820,000.00)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	420.270.000,00	270,450,000.00	(149,820,000.00)
		- Pendanaan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	226,070,000.00	153,350,000.00	(72,720,000.00)
		- Penagihan Pajak Daerah	194,200,000.00	117,100,000.00	(77,100,000.00)
4	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui	UPT Pendapatan Wilayah III Poso			-
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	374,696,000.00	358,790,000.00	(15,906,000.00)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	374,696,000.00	358,790,000.00	(15,906,000.00)

2	3	4	5	6
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	301.800.000,00	198.050.000,00	(103.750.000,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	301.800.000,00	198.050.000,00	(103.750.000,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	150.900.000,00	98.650.000,00	(52.250.000,00)
	- Penagihan Pajak Daeah	150.900.000,00	99.400.000,00	(51.500.000,00)
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	484.718.183,00	411.203.500,00	(73.514.683,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	484.718.183,00	411.203.500,00	(73.514.683,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	301.714.000,00	305.753.500,00	4.044.500,00
	- Penagihan Pajak Daeah	183.004.183,00	105.450.000,00	(77.554.183,00)
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	378.530.000,00	226.100.000,00	(152.430.000,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	378.530.000,00	226.100.000,00	(152.430.000,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	199.530.000,00	117.000.000,00	(82.530.000,00)
	- Penagihan Pajak Daeah	179.000.000,00	109.100.000,00	(69.900.000,00)
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	460.382.208,00	400.736.000,00	(59.646.208,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	460.382.208,00	400.736.000,00	(59.646.208,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	241.016.000,00	207.493.000,00	(33.523.000,00)
	- Penagihan Pajak Daeah	219.366.208,00	193.243.000,00	(26.123.208,00)
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	116.473.600,00	113.880.800,00	(2.592.800,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	116.473.600,00	113.880.800,00	(2.592.800,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	41.435.600,00	41.092.800,00	(342.800,00)
	- Penagihan Pajak Daeah	75.038.000,00	72.788.000,00	(2.250.000,00)
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	532.041.200,00	382.790.000,00	(149.251.200,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	532.041.200,00	382.790.000,00	(149.251.200,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	265.502.000,00	190.990.000,00	(74.512.000,00)
	- Penagihan Pajak Daeah	266.539.200,00	191.800.000,00	(74.739.200,00)

1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	301.583.234,00	259.686.617,00	(41.896.617,00)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	301.583.234,00	259.686.617,00	(41.896.617,00)
		- Pendataan dan Pendaftaran Obkek Pajak Daerah	178.650.000,00	153.200.000,00	(25.400.000,00)
		- Penagihan Pajak Daeah	122.933.234,00	106.486.617,00	(16.446.617,00)
6	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	501.090.000,00	414.915.000,00	(86.175.000,00)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	501.090.000,00	414.915.000,00	(86.175.000,00)
		- Pendataan dan Pendaftaran Obkek Pajak Daerah	228.170.000,00	230.865.000,00	2.695.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	272.920.000,00	184.050.000,00	(88.870.000,00)
7	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	362.552.000,00	380.926.000,00	18.374.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	362.552.000,00	380.926.000,00	18.374.000,00
		- Pendataan dan Pendaftaran Obkek Pajak Daerah	213.146.000,00	236.300.000,00	23.154.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	149.406.000,00	144.626.000,00	(4.780.000,00)
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	417.007.000,00	290.964.037,39	(126.042.962,61)
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	417.007.000,00	290.964.037,39	(126.042.962,61)
		- Pendataan dan Pendaftaran Obkek Pajak Daerah	268.639.000,00	193.444.933,30	(75.194.066,70)
		- Penagihan Pajak Daeah	148.368.000,00	97.519.104,00	(50.848.896,00)

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.419.769.783,31	99.168.419.849,22	10.748.650.065,91
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.632.836,17	301.621.170,54	1.988.334,37
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.213.250,00	155.201.584,37	988.334,37
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.419.586,17	146.419.586,17	1.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.938.371.126,14	74.640.773.455,64	7.702.402.329,50
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.272.219.626,14	73.046.365.205,64	6.774.165.579,6
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1.396.503.500,00	1.397.190.750,00	687.250,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	269.648.000,00	159.030.000,00	(110.618.000,00)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.995.000,00	159.030.000,00	9.035.000,00
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.995.000,00	159.030.000,00	9.035.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	801.074.295,00	434.483.200,00	(366.591.095,00)
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	87.611.750,00	44.779.250,00	(42.832.500,00)
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan	116.632.700,00	41.199.700,00	(75.433.000,00)
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	69.564.400,00	46.951.900,00	(22.612.500,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	470.634.591,00	250.442.350,00	(220.192.241,00)
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	56.630.854,00	51.110.000,00	(5.520.854,00)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	389.348.200,00	218.902.900,00	(170.445.300,00)
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000,00	53.328.200,00	(46.671.800,00)
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148.225.000,00	141.995.950,00	(6.229.050,00)
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109.440.000,00	8.940.000,00	(100.500.000,00)
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.683.200,00	14.638.750,00	(17.044.450,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.095.858.555,00	7.925.795.636,61	1.829.937.081,61
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	131.478.382,00	125.739.191,00	(5.739.191,00)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.826.237.200,00	4.880.026.194,08	53.788.994,08
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	344.880.000,00	1.757.475.050,00	1.412.595.050,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.872.873,00	1.041.737.951,53	439.865.078,53
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	191.390.100,00	120.817.250,00	(70.572.850,00)

1	2	3	4	5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.289.423.000,00	7.332.107.992,00	1.042.684.992,00
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.010.000.000,00	0,01	(1.009.999.999,99)
	- Pengadaan Aset tak Berwujud	799.938.000,00	869.938.000,00	70.000.000,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.479.485.000,00	6.462.169.992,00	1.982.684.992,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.780.306.771,00	6.400.375.452,00	620.068.681,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.990.542.771,00	4.172.111.452,00	181.568.681,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.664.000,00	202.964.000,00	50.300.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.637.100.000,00	2.025.300.000,00	388.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.675.760.000,00	1.755.330.042,43	79.570.042,43
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.700.000,00	139.850.042,43	(18.849.957,57)
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.500.000,00	249.500.000,00	1,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.950.663,00	351.720.000,00	53.769.337,00
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	969.609.337,00	1.014.260.000,00	44.650.663,00
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.206.350.250,00	2.353.229.575,00	146.879.325,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.264.550,00	46.106.550,00	(13.158.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.264.550,00	46.106.550,00	(13.158.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.665.280,00	380.171.605,00	119.506.325,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.665.280,00	260.171.605,00	19.506.325,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.639.230.420,00	1.654.841.420,00	15.611.000,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	453.001.920,00	490.004.920,00	37.003.000,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.328.500,00	326.336.500,00	59.008.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	918.900.000,00	838.500.000,00	(80.400.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.190.000,00	272.110.000,00	24.920.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.150.000,00	89.150.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.040.000,00	182.960.000,00	24.920.000,00

1	2	3	4	5
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	970.141.162,00	1.044.851.024,42	74.709.862,42
	Administras Keuangan Perangkat Daerah	94.624.000,00	86.981.000,00	(7.643.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	94.624.000,00	86.981.000,00	(7.643.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.351.901,00	130.424.763,42	49.072.862,42
	- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	115.027.113,42	112.027.113,42
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.351.901,00	115.027.113,42	36.675.212,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.825.261,00	677.355.261,00	(14.470.000,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	134.125.261,00	131.655.261,00	(2.470.000,00)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.700.000,00	545.700.000,00	(12.000.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.340.000,00	150.090.000,00	47.750.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.800.000,00	27.800.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.540.000,00	122.290.000,00	47.750.000,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso			-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	696.343.651,00	686.998.037,00	(9.345.614,00)
	Administras Keuangan Perangkat Daerah	166.766.347,00	153.192.985,00	(13.573.362,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	166.766.347,00	153.192.985,00	(13.573.362,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.590.804,00	65.175.052,00	(1.415.752,00)
	- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.657.250,00	1.657.250,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.933.554,00	63.517.802,00	(1.415.752,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.848.500,00	393.430.000,00	(11.418.500,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	135.118.500,00	119.800.000,00	(15.318.500,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	3.930.000,00	6.130.000,00	2.200.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.800.000,00	267.500.000,00	1.700.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.138.000,00	75.200.000,00	17.062.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	37.700.000,00	2.700.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.138.000,00	37.500.000,00	14.362.000,00

1	2	3	4	5
5	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	648.463.552,00	679.766.550,00	31.302.998,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.046.000,00	126.098.000,00	(20.948.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.046.000,00	126.098.000,00	(20.948.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.651.702,00	57.948.932,00	11.297.230,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.248.070,00	5.163.942,00	(84.128,00)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.403.632,00	52.784.990,00	11.381.358,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.126.250,00	261.566.618,00	(18.559.632,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.926.250,00	99.666.618,00	7.740.368,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.200.000,00	7.700.000,00	(3.500.000,00)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.000.000,00	154.200.000,00	(22.800.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.639.600,00	234.153.000,00	59.513.400,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.300.000,00	114.300.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.339.600,00	119.853.000,00	59.513.400,00
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	925.805.120,00	1.015.975.689,88	90.170.569,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.325.000,00	162.789.000,00	39.464.000,00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.325.000,00	162.789.000,00	39.464.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.098.320,00	92.618.120,00	29.519.800,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.098.320,00	92.618.120,00	29.519.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.381.800,00	637.718.569,88	3.336.769,88
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.641.800,00	115.317.000,00	10.675.200,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.940.000,00	13.601.569,88	1.661.569,88
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.800.000,00	508.800.000,00	(9.000.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	122.850.000,00	17.850.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	59.000.000,00	14.000.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	63.850.000,00	3.850.000,00

1	2	3	4	5
7	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	523.120.372,00	598.615.402,00	75.495.030,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	228.631.075,00	192.176.823,00	(20.948.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.631.075,00	192.176.823,00	(20.948.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.741.929,00	141.467.680,00	70.725.751,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.218.710,00	6.070.410,00	3.851.700,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.523.219,00	135.397.270,00	69.874.051,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.867.368,00	172.420.899,00	(19.446.469,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.567.368,00	62.120.899,00	(12.446.469,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.300.000,00	105.300.000,00	(9.000.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.639.600,00	234.153.000,00	59.513.400,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.300.000,00	114.300.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.339.600,00	119.853.000,00	59.513.400,00
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-toli			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	684.349.327,60	711.963.956,16	90.170.569,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.998.039,60	121.247.193,16	39.464.000,00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	131.998.039,60	121.247.193,10	39.464.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.140.096,00	69.109.485,00	30.969.389,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.873.000,00	0	(2.873.000,00)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.267.096,00	69.109.485,00	33.842.380,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.790.522,00	283.071.778,00	(60.718.744,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.390.522,00	107.871.778,00	(41.518.744,00)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.400.000,00	175.200.000,00	(19.200.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.420.670,00	238.535.500,00	68.114.830,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	82.000.000,00	37.000.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.420.670,00	156.535.500,00	3.850.000,00

1	2	3	4	5
9	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	576.459.297,00	708.897.507,00	132.438.210,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	195.540.000,00	188.789.998,00	(6.750.002,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.540.000,00	188.789.998,00	(6.750.002,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.415.147,00	23.379.636,00	(7.035.511,00)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.415.147,00	23.379.636,00	(7.035.511,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.344.150,00	439.567.873,00	146.223.723,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.344.150,00	86.767.873,00	30.423.723,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.400.000,00	349.200.000,00	115.800.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.160.000,00	57.160.000,00	-
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.800.000,00	27.800.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.360.000,00	29.360.000,00	-
10	UPT Pendapatan Wil. IX Touna			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	575.033.824,00	587.641.399,00	12.607.575,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.596.000,00	97.183.000,00	(25.413.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.596.000,00	97.183.000,00	(25.413.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.934.050,00	49.772.399,00	15.838.349,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik?Penerangan Bangunan Kantor	2.320.310,00 R	3.037.372,00	29.519.800,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.613.740,00	46.735.027,00	15,121,287,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.413.774,00	310.050.000,00	16.636.226,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.143.774,00	119.280.000,00	59.136.226,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.170.000,00	8.670.000,00	1.500.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.100.000,00	182.100.000,00	(24.000.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.090.000,00	130.636.000,00	5.546.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.700.000,00	25.650.000,00	(16.050.000,00)
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.390.000,00	104.986.000,00	21.596.000,00

1	2	3	4	5
11	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.038.735.623,09	1.009.474.390,50	(29.261.232,59)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.400.000,00	45.200.000,00	(65.200.000,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.400.000,00	45.200.000,00	(65.200.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.558.889,09	91.669.087,50	39.110.198,41
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.200,00	4.209.000,00	1.209.800,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.559.689,09	87.460.087,50	37.900.398,41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.888.500,00	440.546.319,00	(22.342.181,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.588.500,00	104.246.319,00	(21.342.181,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.300.000,00	333.300.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.305.000,00	172.372.367,00	61.067.367,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.755.000,00	63.894.367,00	30.139.367,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.550.000,00	108.478.000,00	30.928.000,00
12	UPT Pendapatan Wil.XI Sigi			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.042.843.504,00	1.162.408.714,00	119.565.210,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.800.000,00	6.721.750,00	(62.078.250,00)
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.800.000,00	6.721.750,00	(62.078.250,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.377.904,00	389.971.406,00	211.598.502,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.174.774,00	31.723.450,00	8.548.676,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.203.130,00	358.247.956,00	203.044.826,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.485.600,00	638.885.558,00	(79.600.042,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.685.600,00	171.285.558,00	(80.400.042,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.400.000,00	12.200.000,00	800.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.400.000,00	455.400.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.180.000,00	126.830.000,00	49.650.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.500.000,00	48.750.000,00	17.250.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.680.000,00	78.080.000,00	32.400.000,00

1	2	3	4	5
13	UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	446.382.490,00	398.436.257,95	(47.946.232,05)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.066.000,00	70.265.000,00	14.199.000,00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.066.000,00	70.265.000,00	14.199.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.427.740,00	70.699.557,90	(22.728.182,10)
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.292.850,00	2.080.237,20	(1.212.612,80)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.134.890,00	68.619.320,75	(21.515.569,25)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.350.000,00	107.617.200,00	(37.732.800,00)
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.350.000,00	37.417.200,00	(38.932.800,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.800.000,00	67.800.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.538.750,00	149.854.500,00	(1.684.250,00)
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.750.000,00	45.750.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.788.750,00	104.104.500,00	(1.684.250,00)
14	UPT Pendapatan Wil.XIII Banggai Laut			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	438.143.372,00	464.556.739,99	26.413.387,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.288.000,00	125.716.000,00	10.428.000,00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.288.000,00	125.716.000,00	10.428.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.987.172,00	66.410.740,00	(23.576.432,00)
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.885,00	4.023.450,00	1.026.565,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.990.287,00	62.387.290,00	(24.602.997,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.668.200,00	212.209.999,99	35.541.799,99
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.318.200,00	66.959.999,99	(358.200,01)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00	15.050.000,00	10.100.000,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.400.000,00	130.200.000,00	25.800.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.200.000,00	60.220.000,00	4.020.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.500.000,00	39.500.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.700.000,00	20.720.000,00	4.020.000,00

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2.. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	40	42	45
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	-	-	79	-	-

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	38.79	39.21	39.57	39.85	40.04	40.23

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pelaksanaan program kegiatan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong terciptanya sasaran - sasaran yang akan mempercepat terwujudnya Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, . Tujuan utama dari program ini adalah mendukung kelancaran proses pemerintahan daerah dengan cara memperbaiki dan mengembangkan sistem administrasi, teknologi informasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bapenda.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan pajak, memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Program penunjang urusan pemerintahan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi penerimaan daerah melalui berbagai sumber pajak dan retribusi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan instansi terkait.

Program pengelolaan pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pendapatan daerah yang optimal sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulteng. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Sulteng melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dengan pendekatan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan administrasi yang lebih baik.

Adapun sasaran utama Indikator Kinerja yang diharapkan terwujud untuk tahun 2025 terlihat pada format Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,96
2.	Meningkatnya Proporsi Pajak Daerah Daerah Terhadap PDRB ADHK	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,57

Sumber Dana APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.890.358.094,00	APBD
2.	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.131.861.531,00	APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **30** Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.SI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,96
2.	Meningkatnya Proporsi Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHK	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,57

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	98.890.358.094,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	8.131.861.531,00	APBD

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38.79

Sumber Dana APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.486.094.073,48	APBD
2.	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.355.784.285,89	APBD
	Jumlah	Rp. 102.841.878.359,37	APBD



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,79%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Badan Pendapatan Daerah		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.486.094.073,48	APBD
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.355.784.285,89	APBD
Jumlah	Rp. 102.841.878.359,37	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670727 198603 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA

Penilaian atas pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja. Dalam tahun anggaran 2025 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai.

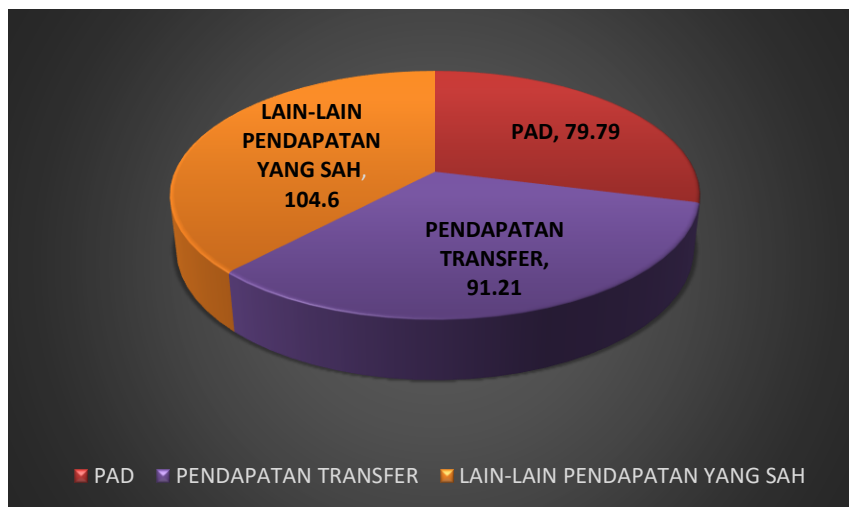
Sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja yang menyertai.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai capaian masing-masing indikator hingga akhir tahun 2025, pengukuran kinerja juga diperlukan untuk mengetahui *trend* capaian indikator dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya serta perubahan-perubahan yang terjadi sejak indikator tersebut ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 baik dari segi definisi operasional, cara perhitungan maupun target. Pada tahun 2025 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 4.950.524.910.553.26 dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD	:	Rp. 2.063.106.893.010,52
2. Pendapatan Transfer	:	Rp. 2.847.380.802.840
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	:	Rp. 40.037.214.702,74

Komposisi Capaian (%) penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan yang Sah menempati posisi tertinggi disusul dengan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 41,67 % Adapun Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat seluruhnya dibandingkan mengingat adanya perbedaan sasaran kinerja dan indikator kinerja di tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4x100%)	7
1	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisiensi - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38,79	41,67	107,30	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut di atas, capaian realisasi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan sebesar 41,62 dari target 38,79 dengan nilai capaian sebesar 107,30%. Dari hasil realisasi tersebut, terlihat bahwa capaian indikator kinerja terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah tercapai dengan kategori Sangat Tinggi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka nilai capaian kinerja dikategorikan sangat tinggi sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Tinggi
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total penerimaan Pendapatan Daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian Fiskal Daerah melalui Optimalisasi PAD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan 2024

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan keuangan di bidang pendapatan sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021- 2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Daerah

REALISASI				
NO	AYAT PENERIMAAN	T.A 2023	T.A 2024	T.A 2025
1	2	3	4	5
1.	PAD	1,719,164,510,752.63	2,115,188,753,206.52	2,063,106,893,010.52
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,823,279,573,833.00	3,429,876,216,802.00	2,847,380,802,840.00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5,667,305,361.00	10,523,709,370.00	40,037,214,702.74
Jumlah Pendapatan Daerah		4,548,111,389,946.63	5,555,588,679,378.52	4,950,524,910,553.26
Persentase PAD terhadap Pendapatan		37.87	38.07	41.67

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2025 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2024 jumlah pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.007.477.289.431,89 (22,1%) dari tahun 2023. Namun, ditahun 2025 jumlah pendapatan daerah menurun sebesar Rp. 605.063.768.825,26 (10,89%) dari tahun 2024.

Penurunan pendapatan terjadi di Tahun 2025 dikarenakan menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang umumnya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta penyerapan belanja daerah yang kurang dari target. Perlu diketahui bahwa, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan target dan realisasi PAD dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD

NO	RINCIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capain %	Target	Realisasi	Capain %	Target	Realisasi	Capain %
1	Pajak Daerah	Rp 1,347,241,242,844.00	Rp 1,402,239,230,951.10	104,08	Rp 1,629,000,000,000.00	Rp 1,774,182,144,129.46	108,91	Rp 2,080,500,000,000.00	Rp 1,701,581,912,900.73	81,79
2	Retribusi Daerah	Rp 21,420,497,000.00	Rp 23,347,868,082.00	109	Rp 17,100,594,800.00	Rp 19,497,629,593.00	114,02	Rp 52,265,916,170.00	Rp 28,740,924,020.00	54,99
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 276,180,254,889.00	Rp 52,412,250,973.00	18,98	Rp 212,100,000,000.00	Rp 51,244,848,172.00	24,16	Rp 50,100,000,000.00	Rp 52,785,622,487.00	105,36
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 310,379,043,150.00	Rp 241,165,160,746.53	77,70	Rp 393,460,617,339.00	Rp 270,264,131,312.06	68,69	Rp 402,800,170,631.10	Rp 279,998,433,602.79	69,51
	JUMLAH	Rp 1,955,221,037,883.00	Rp 1,719,164,510,752.63	87,93	Rp 2,251,661,212,139.00	Rp 2,115,188,753,206.52	93,94	Rp 2,585,666,086,801.10	Rp 2,063,106,893,010.52	80%

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar 0,25% atau Rp. 52.081.860.196 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Untuk tahun 2024 efektivitasnya tidak mencapai 100% yakni sebesar 80%. Pengukuran Efektivitas dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi dengan jumlah target Pajak Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 komponen PAD yang mempunyai efektivitas paling tinggi yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan capaian persentase melebihi 100% yakni sebesar 105,36% sedangkan komponen PAD dengan efektivitas paling rendah terdapat pada komponen Retribusi Daerah hanya sebesar 54,99%. Data ini berbanding terbalik dengan data capaian tahun 2024 yang dimana Komponen tertinggi dihasilkan oleh komponen Retribusi Daerah dengan capaian persentase efektivitas sebesar 114,02 %. Sedangkan komponen PAD yang efektivitasnya paling rendah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan capaian sebesar 24,16 %.

Pajak daerah merupakan penerimaan yang ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

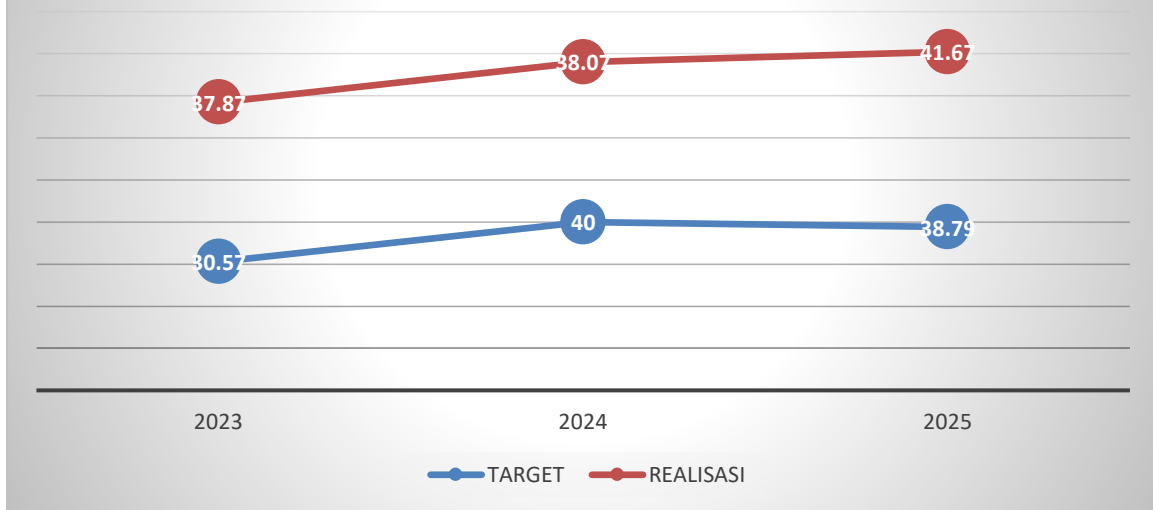
Untuk mengukur perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30,57	37,87	123,88	40	38,07	95,18	-	-	-
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	79	83,99	106,32	-	-	-
3.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	-	-	-	-	38,79	41,67	107,30

perubahan Tujuan/Sasaran Kinerja pada Renstra terbaru yakni Renstra Bapenda 2025-2029

Perbandingan Capaian Kinerja 2023 s/d 2025



Capaian Kinerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2024 yang mencapai 107,30% namun hal ini tidak dapat dijadikan patokan perbandingan mengingat tujuan/sasaran serta indikator kinerjanya berbeda antara tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025. Perubahan capaian kinerja akibat terjadinya perubahan indikator pada Renstra karena adanya penyesuaian dokumen perencanaan atau penyesuaian dengan RPJMD baru agar indikator lebih terukur, objektif dan mencerminkan prioritas Pembangunan terkini. Namun yang perlu diketahui bahwa Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah semakin meningkat. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal dan partisipasi Masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan. Rasio yang tinggi (>70%) menunjukkan daerah mandiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, sementara peningkatan PAD Positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran Tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun periode 2025-2030. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Di Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target Akhir Renstra 2030 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien - Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	41,67	40,23	103,46

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun berjalan s.d akhir periode Renstra merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai hingga akhir periode Rencana Strategis dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan tabel 3.6 diatas, menunjukkan bahwa realisasi kinerja Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah mencapai targetnya sesuai dengan target Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan dan mengalami kemajuan melebihi 100% yakni mencapai 103,46% dengan persentase realiasi kinerja 41,62% melebihi dari target akhir rentsra 2030.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian tahun 2025 dengan Standar Nasional
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025			Realisasi Nasional 2025			Lebih Tinggi/ Lebih Besar (Capaian)
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38,79	41,67	107,30	40,75	44,42	109,01	1,71 %

Capaian Realisasi Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah dikategorikan telah mencapai target Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,83% dengan capaian sebesar 107,30%.

Sedangkan untuk penyerapan anggaran, Capaian Realisasi Persentase Total Pendapatan Daerah dikategorikan belum mencapai target APBDP tahun anggaran 2025, yang dimana Persentase target APBDP terhadap Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar 45% sedangkan realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 41,67 artinya masih kurang 3,33% untuk mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan realisasi penyerapan anggaran pada indikator Pendapatan Asli Daerah dan indikator Pendapatan Transfer tidak mencapai target APBDP yang ditetapkan.

Selanjutnya pada kolom capaian nasional/daerah lain yang kami lampirkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Sumatera Barat (*sumber : ([Dashboard Pembangunan](#))*) yang dimana indikatornya yakni Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian pada tahun 2025 yakni Target sebesar 40,75% dan Realisasi 44,42% serta capaian sebesar 109,01%, sehingga jika disandingkan maka capaian IKU Pemerintah Provinsi Sumbar di tahun 2025 lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan selisih capaian sebesar 1,71%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 Target Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5.745.581.535.782 dan terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp. 4.950.524.910.553,26 atau 86,16 % dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.063.106.893.010,52 atau 79,79% dari Target sebesar Rp. 2.585.666.086.801,10 dengan rincian :
- Pajak Daerah Target Rp. 2.080.500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.701.581.912.900,73 atau 81,79 %;
 - Retribusi Daerah Target Rp. 52.265.916.170 terealisasi sebesar Rp.28.740.924.020 atau 54,99 %;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp.50.100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 52.785.622.487 atau 105,36 %; dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp.402.800.170.631,10 terealisasi sebesar Rp. 279.998.433.602,79 atau 69,51 %.
- b) Pendapatan transfer Target Sebesar Rp. 3.121.640.512.000 terealisasi sebesar Rp.2.847.380.802.840 atau 91,21% dengan rincian :
- Insentif Fiskal Target Rp. 5.675.543.000 terealisasi sebesar Rp. 5.675.543.000 atau 100%;
 - Dana Bagi Hasil Target Rp. 964.520.416.000 terealisasi sebesar Rp.731.027.698.900 atau 75,79 %;
 - Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.590.676.442.000 terealisasi sebesar Rp.1.577.171.811.073 atau 99,15 %; dan
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 560.768.111.000 terealisasi sebesar Rp.533.505.749.867 atau 95,14 %.
- c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Target Rp. 38.274.936.981 terealisasi sebesar Rp. 40.037.214.702,74 atau 104,60 % dengan Rincian :

- Pendapatan Hibah Target Rp. 1.929.412.500 terealisasi Rp. 1.366.289.000 atau 70,81 %; dan
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Target Rp. 36.345.524.481 terealisasi Rp. 38.670.925.702,74 atau 106,40 %.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 sebagaimana sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Bapenda Tahun 2025-2029 bahwa Indikator yang ditetapkan telah tercapai sesuai target yang ditentukan serta berdasarkan data realisasi diatas dengan realiasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah melampaui target yang telah ditetapkan akan tetapi pencapaian tersebut tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal serta masih ditemui beberapa permasalahan/hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Adapun Analisa penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sebagai berikut :
1. System digitalisasi pajak semakin baik dimana penerapan system pembayaran pajak berbasis Qris, Virtual Account, Mobile Banking serta alat rekam pajak telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah
 2. Adanya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah serta koordinasi antar instansi pemerintah yang solidMemanfaatkan penerapan inovasi ATT (Aksi Tempel-Tempel) sebagai upaya pengingat langsung, sanksi social dan penerbitan serta transparansi kepada publik bahwa yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban pajaknya kepada daerah
 3. Hadirnya layanan Samsat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Samsat Corner untuk mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat yang lebih praktis, cepat dan efisien
 4. Penerapan strategi jemput bola di beberapa UPT Samsat untuk menjangkau wajib pajak di wilayah pelosok dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial di beberapa wilayah kabupaten/kota di provinsi sulawesi Tengah.

- Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam Upaya pencapaian target kinerja sebagai berikut :
1. Masih rendahnya budaya kepatuhan pajak masyarakat menjadi hambatan krusial, masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan teguran berkali-kali serta Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi
 2. Dengan adanya penerapan strategi jempot bola selain bermanfaat untuk mempermudah proses pembayaran dan pemberian edukasi fiskal secara langsung, namun strategi ini juga memerlukan biaya operasional dan tenaga yang cukup besar sehingga efektivitasnya bergantung pada keberlanjutan dukungan kelembagaan dan anggaran
 3. Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah tertentu menjadi penghambat optimalisasi strategi bapenda di beberapa UPT Samsat.
 4. Secara internal Adanya kendala lingkungan seperti kurangnya ketersediaan data yang akurat tentang subjek dan objek biaya, kapasitas SDM yang terbatas, dukungan infrastruktur dan sistem administrasi dan pelaporan yang tidak memadai dan tidak terorganisir dengan baik
 5. Pada aspek lingkungan eksternal, permasalahan yang ditemukan adalah terkait dengan keterbatasan insfrastruktur seperti transportasi maupun jaringan yang tidak memadai, rendahnya kesadaran Masyarakat serta lemahnya kualitas pengawasan
 6. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat.
 7. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkadang tidak konsisten dengan keadaan maupun arah kebijakan daerah.
- Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal adanya tunggakan pajak daerah wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
2. Dengan banyaknya wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pembayaran meskipun sudah diberikan teguran berkali-kali, maka bapenda perlu menempuh Langkah represif melalui penetapan pajak secara jabatan dan pembentukan tim terpatu bersama aparat penegak hukum
3. Melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak dengan bekerja sama dengan aparatur wilayah sekitar
4. Meningkatkan akurasi data PAD Potensial yang memudahkan untuk merencanakan dan menetapkan tujuan PAD, data dan informasi yang konsisten melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pengkajian dan pengembangan dengan melibatkan beberapa unsur Masyarakat
5. Meningkatkan kinerja aparatur sumber daya penyelenggara layanan yang meliputi Kemahiran dalam masalah lapangan, pemahaman mendalam tentang aspek hukum/regulasi terkait pajak dan retribusi daerah serta kemampuan menangani administrasi dan pelaporan dengan baik dan akurat. Salah satu yang telah dilaksanakan Bapenda Prov sulteng di tahun 2025, keikutsertaan beberapa Aparatur mengikuti Bimtek terkait administrasi pemerintah serta kesempatan melakukan sharing session ke berbagai daerah di Indonesia terutama pada daerah-daerah yang PAD-nya dikelola dengan baik dan terjadi peningkatan PAD yang signifikan
6. Meningkatkan Koordinasi baik antar internal pengelola PAD maupun dengan instansi terkait untuk memperlancar kegiatan pengelolaan PAD. Beberapa hal yang dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi antara lain:
 - Mengoptimalkan fungsi UPT dan meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah lainnya di tingkat kecamatan
 - Meninjau kembali peraturan yang tidak relevan dan mulai menyusun peraturan baru yang lebih relevan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat atau keadaan terkini

7. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan maupun penetapan kebijakan pemerintahan serta perlunya penyebaran informasi publik/ edukasi publik secara luas kepada masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi bagi kelangsungan pelayanan publik dan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dimana pajak pada akhirnya dikembalikan kepada mereka dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas penunjang publik.
8. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), Gerai Samsat Corner, serta Samsat Digital dan *Drive-Thru*
 - Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker ATT (Aksi Tempel-tempel) pada kendaraan bermotor.
 - Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan.
9. Melakukan studi banding/ *sharing session* ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang PAD-nya dikelola dengan baik dan terjadi peningkatan PAD yang signifikan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2025 sumber penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Anggaran sebesar Rp. 117.212.094.460,51- (Seratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh koma Lima Puluh Satu Rupiah),

- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 107.663,895.309,00- (Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau 91,85 %.

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada tahun 2025. Analisis tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%) (5-8)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien - Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38,79	41,62	107,30	117,212,094,460.51	107,663,895,309.00	91,85	15,44

Capaian indikator terwujudnya pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien diukur melalui kemampuan unit dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan secara maksimal, dengan biaya pemungutan yang minimal, tepat waktu dan akurat dimana indikator ini diharapkan dapat menjadi keberhasilan dalam meningkatkan PAD maupun optimalisasi penerimaan daerah. Berdasarkan tabel 3.8 diatas, Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian indikator kinerja sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian rata-rata diatas 100% atau sebesar 107,30%. Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terjadi penyerapan anggaran sebesar 91,85% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 15,44%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

➤ **Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah**

Dengan Indikator Kinerja : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang telah tercapai sebesar 107,30% melalui 2 Program yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Rp	Rp	%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.880.545.985,39	6.297.227.584,00	91,52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	110.331.548.475,12	101.366.667.725,00	91,87

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.880.545.985,39 dan telah terealisasi Rp.6.297.227.584 dengan hasil yang dicapai adalah 91,52%.

Penghambat :

- Terdapat disparitas data antara mitra kerja dalam penatausahaan data kendaraan bermotor serta rendahnya kapasitas pengelola anggaran dan aparatur pemungut pajak dalam hal teknis pengelolaan, manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi
- Sistem Pemungutan Pajak yang belum terdigitalisasi secara penuh atau manual, menghambat kecepatan dan transparansi pelayanan
- Masih minimnya kepatuhan wajib pajak dalam penundaan pembayaran dan atau adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dimana

wajib pajak merasa tidak mendapatkan timbal balik pelayanan publik secara langsung

- Penegakan hukum dan sanksi bagi penunggak pajak atau retribusi yang belum maksimal

Pendorong Keberhasilan :

- Pimpinan Unit rutin Melakukan Monitoring dan Evaluasi para penyelenggara layanan dalam Upaya membenahan manajemen pengelolaan pajak, pendataan ulang wajib pajak dan perluasan objek pajak
- Penerapan inovasi Aksi Tempel-Tempel (ATT) dalam Upaya menertibkan wajib pajak yang tidak patuh sebagai bentuk peringatan langsung, sanksi social dan moral, transparansi kepada public, penertiban dan pengamanan PAD serta menjadi Media Edukasi
- Sosialisasi yang massif hingga kedaerah terpencil, dengan memanfaatkan media social maupun media cetak untuk meningkatkan pemahaman kepada wajib pajak
- Adanya Sinergi yang baik dengan mitra kerja sehingga mampu menciptakan inovasi baru yang mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 110.331.548.475,12 dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.366.667.725,00 dengan hasil yang dicapai adalah 91,87 %.

Penghambat :

- Masih kurangnya program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang di era digitalisasi masa kini.
- Kurangnya sosialisasi dalam Upaya penyebaran informasi publik dari pemerintah yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif Masyarakat

Penunjang Keberhasilan :

- Penyusunan dokumen perencanaan yang hamper tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rill Masyarakat dan unit kerja
- Penyediaan anggaran dan kesempatan para aparatur untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
- Adanya Inovasi pembayaran pajak daerah secara online, memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tatap muka dengan petugas.
- Adanya Komitmen Pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan

Adapun secara umum terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan dan penghambat kinerja dalam capaian anggaran program dan kegiatan terlampir pada table sebagai berikut :

NO	Faktor Penunjang Keberhasilan	Faktor Penghambat
1.	Koordinasi, Sinergitas dan Kerjasama unit Bapenda dengan beberapa stakeholder dalam optimalisasi pendapatan daerah yang sudah terbangun dengan baik	Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang
2.	Komitmen yang tinggi baik ditingkat kepala daerah maupun pimpinan unit dalam rangka akselerasi optimalisasi pendapatan daerah	Belum ada nya inovasi yang berbasis digitalisasi dalam proses pembayaran pajak
3.	Pemberian insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor disambut dengan baik oleh masyarakat melalui Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024.	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seutuhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan
4.	Adanya implementasi Inovasi ATT (Aksi Tempel-Tempel) dalam Upaya menertibkan wajib pajak yang tidak patuh sebagai bentuk	Dalam proses intensifikasi pajak banyak ditemukan data kepemilikan kendaraan bermotor tidak Valid/ kendaraan bodong

	peringatan langsung, sanksi social dan moral, transparansi kepada public, penertiban dan pengamanan PAD serta menjadi Media Edukasi	
5.	Terlaksananya pengawasan yang baik dalam mendorong pengelolaan anggaran dan pendapatan yang lebih efisien. dan juga Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kampanye pajak yang intensif dan edukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan dapat mendukung capaian IKU.	Belum optimalnya penerimaan pendapatan dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan
6.	Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah melahirkan inovasi Samsat Corner dan Samsat Delivery serta Keberadaan Samsat pada MPP Sulawesi Tengah untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK tahunan yang lebih dekat dan proses yang lebih cepat serta seringkali beroperasi hingga akhir pekan.	Gangguan teknis pada sistem digital yang digunakan untuk pengelolaan pajak dapat mengurangi kenyamanan pengguna dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10	11
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH					98,964,271,741.37	53.89	92,592,133,738.00		93.56
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					99,168,419,849.22		90,964,710,064.00		91.73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks (%)	68		68		100	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	75	301,621,171.00	75	162,103,450.00	100	53.74
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	146,419,586.00	1	66,525,000.00	100	45.43
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	74,640,773,456.00	85	68,633,054,764.00	100	91.95
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	270	73,046,365,206.00	270	67,135,553,014.00	100	91.91
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1,397,190,750.00	12	1,301,112,750.00	100	93.12
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	197,217,500.00	1	196,389,000.00	100	99.58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	159,030,000.00	1	57,150,000.00	100	35.94
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	159,030,000.00	4	57,150,000.00	400	35.94
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	434,483,200.00	100	352,233,526.00	100	81.07
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	44,779,250.00	2	39,364,250.00	100	87.91
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	41,199,700.00	1	22,267,700.00	100	54.05
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4	46,951,900.00	4	44,831,900.00	100	95.48
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Hasil Data Objek, Subyek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	2	250,442,350.00	2	194,769,676.00	100	77.77
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	51,110,000.00	1	51,000,000.00	100	99.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya ASN yang Berkompeten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	218,902,900.00	79	165,082,489.00	100	95.54
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	53,328,200.00	1	52,991,089.00	100	99.37
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	141,995,950.00	1	91,742,650.00	100	64.61
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	8,940,000.00	3	5,710,000.00	100	63.87
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	50	14,638,750.00	50	14,638,750.00	100	100.00

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10	11
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	7,925,795,637.00	79	7,147,838,125.00	100	90.18
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	125,739,191.00	0	0	-	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4,880,026,194.00	6	4,743,517,462.00	100	97.20
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1,757,475,050.00	5	1,418,153,882.00	100	80.69
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1,041,737,952.00	4	878,127,891.00	100	84.29
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	120,817,250.00	1	108,038,890.00	100	89.42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	7,332,107,992.00	79	7,207,122,833.00	100	98.30
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	-	0	0	-	-
	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	Unit	7	869,938,000.00	7	861,717,900.00	100	99.06
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	6,462,169,992.00	9	6,345,404,933.00	100	98.19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	6,400,375,452.00	79	5,524,848,101.00	100	86.32
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	4,172,111,452.00	12	3,853,748,101.00	100	92.37
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	202,964,000.00	1	201,700,000.00	100	99.38
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	2,025,300,000.00	1	1,469,400,000.00	100	72.55
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	1,755,330,042.00	79	1,715,276,776.00	100	97.72
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	60	139,850,042.00	60	116,124,296.00	100	83.03
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	249,500,000.00	60	245,898,480.00	100	98.56
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	351,720,000.00	4	351,709,000.00	100	100.00
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1,014,260,000.00	1	1,001,545,000.00	100	98.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pemungutan PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	38.79	1,914,769,581.00	39.79	1,627,423,674.00	103	84.99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	1,914,769,581.00	100	1,627,423,674.00	100	84.99
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	9	98,301,000.00	9	98,286,000.00	100	99.98
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	18	226,056,300.00	18	129,414,300.00	100	57.25
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	18	104,976,550.00	18	102,781,550.00	100	97.91
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	122,502,000.00	1	121,162,000.00	100	98.91
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	191,592,650.00	1	171,344,250.00	100	89.43
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	16	451,642,500.00	16	377,977,839.00	100	83.69
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah di Tindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	1	78,692,000.00	1	77,621,720.00	100	98.64
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	16	327,312,676.00	16	238,443,270.00	100	72.85
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	24,190,000.00	1	24,100,000.00	100	99.63
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	1	90,479,393.00	1	90,479,393.00	100	100.00
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Jumlah Hasil Pengawasan	Laporan	1	99,464,462.00	1	98,844,462.00	100	99.38
	- Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	99,560,050.00	1	96,968,890.00	100	97.40
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu					4,070,051,020.00		3,583,542,880.00		88.05
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAF, Pajak Alat Berat	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks (%)	68	2,353,229,575.00	68	2,327,098,430.00	100	98.89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	46,106,550.00	85	46,106,550.00	100	100.00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	46,106,550.00	12	46,106,550.00	100	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	380,171,605.00	79	379,518,186.00	100	99.83
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	120,000,000.00	1	119,678,000.00	100	99.73
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	260,171,605.00	3	259,840,186.00	100	99.87
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	1,654,841,420.00	79	1,636,728,679.00	100	98.91
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	490,004,920.00	1	488,003,679.00	100	99.59
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	326,336,500.00	1	325,575,000.00	100	99.77
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	838,500,000.00	1	823,150,000.00	100	98.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	272,110,000.00	79	264,745,015.00	97	99.88
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	89,150,000.00	1	82,985,015.00	93	99.88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	182,960,000.00	3	181,760,000.00	99	99.88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	38,79	1,257,284,450.00	38,79	1,256,444,450.00	100	99.22
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	1,257,284,450.00	100	1,256,444,450.00	100	99.22
	- Pendataan dan Pendaftaran Obejk Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	940,260,000.00	12	939,670,000.00	100	99.22
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	317,024,450.00	1	316,774,450.00	100	99.22
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong					1,315,301,024.00		1,294,234,565.00	98	98.11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) PD	Indeks (%)	68	1,044,851,024.00	68	1,025,959,565.00	98	97.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	86,981,000.00	85	86,890,000.00	100	80.03
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	86,981,000.00	12	86,890,000.00	100	80.03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	130,424,763.00	79	129,187,118.00	99	80.03
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	15,397,650.00	1	15,389,928.00	100	80.03
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	115,027,113.00	3	113,797,190.00	99	80.03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	677,355,261.00	87	662,947,242.00	98	100.00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	131,655,261.00	1	117,247,242.00	89	100.00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	-	0	0	#VALUE!	100.00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	545,700,000.00	1	547,700,000.00	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	150,090,000.00	79	146,935,205.00	98	97.70
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27,800,000.00	1	24,695,705.00	89	97.70
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5	122,290,000.00	5	122,239,500.00	100	97.70
Laporan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB-BBN-KB,PAP,Pajak Alat Berat)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	38,79	270,450,000.00	38,79	268,275,000.00	99	100.00
Pr	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB-BBN-KB,PAP,Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	270,450,000.00	100	268,275,000.00	99	100.00
	- Pendataan dan Pendaftaran Obejk Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	153,350,000.00	12	151,750,000.00	99	100.00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	117,100,000.00	1	116,525,000.00	100	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	UPT Pendapatan Wil. III POSO					1,045,788,037.00		1,016,196,487.00		97.17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	686,998,037.00	68	657,561,487.00	100	95.72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	153,192,985.00	85	152,775,000.00	100	99.73
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	153,192,985.00	12	152,775,000.00	100	99.73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	65,175,052.00	79	59,827,216.00	100	91.79
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,657,250.00	1	1,625,000.00	100	98.05
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	63,517,802.00	5	58,202,216.00	100	91.63
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	393,430,000.00	79	369,917,762.00	100	94.02
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	119,800,000.00	1	113,995,762.00	100	95.16
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6,130,000.00	1	6,122,000.00	100	99.87
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	267,500,000.00	1	249,800,000.00	100	93.38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	75,200,000.00	79	75,041,509.00	100	99.79
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	37,700,000.00	1	37,541,509.00	100	99.58
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	37,500,000.00	3	37,500,000.00	100	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	358,790,000.00	38,79	358,635,000.00		99.96
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	358,790,000.00	100	358,635,000.00	100	99.96
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	218,470,000.00	12	218,375,000.00	100	99.96
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	140,320,000.00	1	140,260,000.00	100	99.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	UPT Pendapatan Wil. IV MOROWALI					877,816,550.00		806,762,500.00		91.91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	679,766,550.00	68	620,112,506.00	100	91.22
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	126,098,000.00	85	126,040,000.00	100	99.95
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	126,098,000.00	12	126,040,000.00	100	99.95
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	57,948,932.00	79	54,113,100.00	100	93.38
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,163,942.00	1	5,000,000.00	100	96.83
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	52,784,990.00	3	49,113,100.00	100	93.04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	261,566,618.00	79	217,625,596.00	100	83.20
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	99,666,618.00	1	83,380,596.00	100	83.66
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	7,700,000.00	1	6,745,000.00	100	87.60
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	154,200,000.00	1	127,500,000.00	100	82.68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	234,153,000.00	79	222,333,810.00	100	94.95
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	114,300,000.00	1	102,533,810.00	100	89.71
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	119,853,000.00	6	119,800,000.00	100	99.96
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	198,050,000.00	38,79	186,650,000.00		94.24
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	198,050,000.00	100	186,650,000.00	100	94.24
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	98,650,000.00	12	87,500,000.00	100	88.70
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	99,400,000.00	1	99,150,000.00	100	99.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	UPT Pendapatan Wil. V BANGGAI					1,427,179,189.88		1,209,747,147.00		84.76
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	1,015,975,690.00	68	922,321,647.00	100	90.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	162,789,000.00	85	123,410,000.00	100	75.81
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	162,789,000.00	12	123,410,000.00	100	75.81
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	92,618,120.00	79	91,405,625.00	100	98.69
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,618,120.00	2	91,405,625.00	100	98.69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	637,718,570.00	79	605,092,360.00	100	94.88
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	115,317,000.00	1	98,527,360.00	100	85.44
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13,601,570.00	1	10,565,000.00	100	77.67
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	508,800,000.00	1	496,000,000.00	100	97.48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	122,850,000.00	79	102,413,662.00	100	83.36
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	59,000,000.00	1	41,613,662.00	100	70.53
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	63,850,000.00	1	60,800,000.00	100	95.22
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	411,203,500.00	38,79	287,425,000.00		69.90
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	411,203,500.00	100	287,425,000.00	100	69.90
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	305,753,500.00	12	189,625,000.00	100	62.02
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	105,450,000.00	1	97,800,000.00	100	92.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	UPT Pendapatan Wil. VI BANGGAI KEPULAUAN					824,715,402.00		724,450,561.00		87.84
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	598,615,402.00	68	516,350,561.00	100	86.26
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	192,176,823.00	85	188,880,000.00	100	98.28
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	192,176,823.00	14	188,880,000.00	117	98.28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	141,467,680.00	79	137,560,250.00	100	97.24
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6,070,410.00	1	4,000,000.00	100	65.89
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	135,397,270.00	3	133,560,250.00	100	98.64
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	172,420,899.00	79	150,348,498.00	100	87.20
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	62,120,899.00	1	45,048,498.00	100	72.52
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5,000,000.00	0	0	-	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	105,300,000.00	1	105,300,000.00	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	92,550,000.00	79	39,561,813.00	100	42.75
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	48,700,000.00	1	29,706,813.00	100	61.00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	43,850,000.00	1	9,855,000.00	100	22.47
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	226,100,000.00	38,79	226,100,000.00		100.00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	226,100,000.00	100	226,100,000.00	100	100.00
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	117,000,000.00	12	117,000,000.00	100	100.00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	109,100,000.00	1	109,100,000.00	100	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	UPT Pendapatan Wil. VII TOLI-TOLI					1,112,699,956.16		1,104,724,872.00		99.28
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	711,963,956.00	68	704,126,872.00	100	98.90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	121,247,193.00	85	119,550,900.00	100	98.60
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	121,247,193.00	12	119,550,900.00	100	98.60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	69,109,485.00	79	68,403,569.00	100	98.98
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	69,109,485.00	4	68,403,569.00	100	98.98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	283,071,778.00	79	280,587,750.00	100	99.12
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	107,871,778.00	1	105,387,750.00	100	97.70
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	175,200,000.00	1	175,200,000.00	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	238,535,500.00	79	235,584,653.00	100	98.76
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	82,000,000.00	1	79,098,153.00	100	96.46
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	156,535,500.00	5	156,486,500.00	100	99.97
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	400,736,000.00	38,79	400,598,000.00		99.97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	400,736,000.00	100	400,598,000.00	100	99.97
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	207,493,000.00	12	207,389,000.00	100	99.95
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	193,243,000.00	1	193,209,000.00	100	99.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	UPT Pendapatan Wil. VIII BUOL					822,778,307.00		585,243,561.00		71.13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	708,897,507.00	68	474,462,561.00	100	66.93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	188,789,998.00	85	132,757,000.00	100	70.32
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	188,789,998.00	12	132,757,000.00	100	70.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	23,379,636.00	79	20,427,445.00	100	87.37
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	23,379,636.00	3	20,427,445.00	100	87.37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	439,567,873.00	79	268,816,077.00	100	61.15
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3,600,000.00	1	2,858,686.00	100	79.41
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	86,767,873.00	1	36,133,641.00	100	41.64
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	349,200,000.00	1	229,823,750.00	100	65.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	57,160,000.00	79	52,462,039.00	100	91.78
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27,800,000.00	1	23,229,639.00	100	83.56
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	29,360,000.00	5	29,232,400.00	100	99.57
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	113,880,800.00	38,79	110,781,000.00		97.28
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	113,880,800.00	100	110,781,000.00	100	97.28
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	41,092,800.00	12	38,011,000.00	100	92.50
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	72,788,000.00	1	72,770,000.00	100	99.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	UPT Pendapatan Wil. IX TOJO UNA-UNA					970,431,399.00		961,073,580.00		99.04
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	587,641,399.00	68	579,733,580.00	100	98.65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	97,183,000.00	85	95,725,000.00	100	98.50
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	97,183,000.00	12	95,725,000.00	100	98.50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	49,772,399.00	79	47,760,325.00	100	95.96
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,037,372.00	1	3,024,000.00	100	99.56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	46,735,027.00	5	44,736,325.00	100	95.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	310,050,000.00	79	307,262,459.00	100	99.10
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	119,280,000.00	1	116,562,459.00	100	97.72
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	8,670,000.00	1	8,600,000.00	100	99.19
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	182,100,000.00	1	182,100,000.00	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	130,636,000.00	79	128,985,796.00	100	98.74
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25,650,000.00	1	24,095,796.00	100	93.94
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	104,986,000.00	5	104,890,000.00	100	99.91
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	382,790,000.00	38,79	381,340,000.00		99.62
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	382,790,000.00	100	381,340,000.00	100	99.62
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	190,990,000.00	12	189,865,000.00	100	99.41
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	191,800,000.00	1	191,475,000.00	100	99.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	UPT Pendapatan Wil. XDONGGALA					1,009,474,390.50		1,007,064,245.00		99.76
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	749,787,774.00	68	748,152,945.00	100	99.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	45,200,000.00	85	45,080,000.00	100	99.73
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	45,200,000.00	12	45,080,000.00	100	99.73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	91,669,088.00	79	91,613,674.00	100	99.94
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4,209,000.00	1	4,200,000.00	100	99.79
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	87,460,088.00	3	87,413,674.00	100	99.95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	440,546,319.00	79	440,079,951.00	100	99.89
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	104,246,319.00	1	103,795,951.00	100	99.57
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3,000,000.00	1	2,984,000.00	100	99.47
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	333,300,000.00	1	333,300,000.00	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	172,372,367.00	79	171,379,320.00	100	99.42
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	63,894,367.00	1	62,912,820.00	100	98.46
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	108,478,000.00	4	108,466,500.00	100	99.99
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	259,686,617.00	38,79	258,911,300.00		99.70
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	259,686,617.00	100	258,911,300.00	100	99.70
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	153,200,000.00	12	153,025,000.00	100	99.89
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	106,486,617.00	1	105,886,300.00	100	99.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	UPT Pendapatan Wil. XI SIGI					1,577,323,714.00		1,367,491,904.00		86.70
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	1,162,408,714.00	68	1,052,969,244.00	100	90.59
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	6,721,750.00	85	6,642,750.00	100	98.82
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	6,721,750.00	12	6,642,750.00	100	98.82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	389,971,406.00	79	345,672,495.00	100	88.64
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	31,723,450.00	1	31,407,669.00	100	99.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	358,247,956.00	4	314,264,826.00	100	87.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	638,885,558.00	79	600,079,969.00	100	93.93
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	171,285,558.00	1	163,259,969.00	100	95.31
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12,200,000.00	1	8,400,000.00	100	68.85
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	455,400,000.00	1	428,420,000.00	100	94.08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	126,830,000.00	79	100,574,030.00	100	79.30
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	48,750,000.00	1	26,669,030.00	100	54.71
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	78,080,000.00	1	73,905,000.00	100	94.65
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	414,915,000.00	56,91	314,522,660.00		75.80
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	414,915,000.00	100	314,522,660.00	100	75.80
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	230,865,000.00	12	158,780,000.00	100	68.78
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	184,050,000.00	1	155,742,660.00	100	84.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	UPT Pendapatan Wil. XII MOROWALI UTARA					779,362,257.95		719,021,921.00		92.26
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	398,436,258.00	68	370,251,921.00	100	92.93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	70,265,000.00	85	69,935,000.00	100	99.53
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	70,265,000.00	12	69,935,000.00	100	99.53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	70,699,558.00	79	67,863,450.00	100	95.99
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,080,237.00	1	1,300,100.00	100	62.50
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	68,619,321.00	3	66,563,350.00	100	97.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	107,617,200.00	79	84,834,300.00	100	78.83
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	37,417,200.00	1	32,364,300.00	100	86.50
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,400,000.00	1	2,370,000.00	100	98.75
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	67,800,000.00	1	50,100,000.00	100	73.89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	149,854,500.00	79	147,619,171.00	100	98.51
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	45,750,000.00	1	43,619,171.00	100	95.34
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	104,104,500.00	6	104,000,000.00	100	99.90
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	380,926,000.00	38,79	348,770,000.00		91.56
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	380,926,000.00	100	348,770,000.00	100	91.56
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	236,300,000.00	12	217,050,000.00	100	91.85
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	144,626,000.00	1	131,720,000.00	100	91.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	UPT Pendapatan Wil. XIII BANGGAI LAUT					755,520,777.38		674,207,342.00		89.24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks (%)	68	464,556,740.00	68	402,856,342.00	100	86.72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	85	125,716,000.00	85	114,385,000.00	100	90.99
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	125,716,000.00	12	114,385,000.00	100	90.99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	66,410,740.00	79	62,724,150.00	100	94.45
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4,023,450.00	1	4,023,450.00	100	100.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	62,387,290.00	3	58,700,000.00	100	94.09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	212,210,000.00	79	170,946,951.00	100	80.56
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	66,960,000.00	1	54,796,951.00	100	81.84
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15,050,000.00	1	13,000,000.00	100	86.38
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	130,200,000.00	1	103,150,000.00	100	79.22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	60,220,000.00	79	54,800,241.00	100	91.00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39,500,000.00	1	34,080,241.00	100	86.28
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	20,720,000.00	1	20,720,000.00	100	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	38,79	290,964,037.00	38,79	271,351,000.00		93.26
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB,PAP, Pajak Alat Berat)	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	290,964,037.00	100	271,351,000.00	100	93.26
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	193,444,933.00	12	186,200,000.00	100	96.25
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	97,519,104.00	1	85,151,000.00	100	87.32

1.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai capaian kinerja Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan seperti tergambar pada table dibawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025 Sumber Dana APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	91,836,834,337.22	84,553,726,418.00	92.07
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99,168,419,849.22	90,964,710,064.00	91.73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301,621,170.54	162,103,450.00	53.74
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155,201,584.37	95,578,450.00	61.58
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146,419,586.17	66,525,000.00	45.43
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,640,773,455.64	68,633,054,764.00	91.95
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73,046,365,205.64	67,135,553,014.00	91.91
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,397,190,750.00	1,301,112,750.00	93.12
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	197,217,500.00	196,389,000.00	99.58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	159,030,000.00	57,150,000.00	35.94
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	159,030,000.00	57,150,000.00	35.94
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	434,483,200.00	352,233,526.00	81.07
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	44,779,250.00	39,364,250.00	87.91
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	41,199,700.00	22,267,700.00	54.05
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	46,951,900.00	44,831,900.00	95.48
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	250,442,350.00	194,769,676.00	77.77
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	51,110,000.00	51,000,000.00	99.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218,902,900.00	165,082,489.00	75.41
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,328,200.00	52,991,089.00	99.37
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141,995,950.00	91,742,650.00	64.61
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,940,000.00	5,710,000.00	63.87
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14,638,750.00	14,638,750.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,925,795,636.61	7,147,838,125.00	90.18
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125,739,191.00	-	#VALUE!
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,880,026,194.08	4,743,517,462.00	97.20
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,757,475,050.00	1,418,153,882.00	80.69
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,041,737,951.53	878,127,891.00	84.29
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120,817,250.00	108,038,890.00	89.42
	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,332,107,992.00	7,207,122,833.00	98.30

1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351,720,000.00	351,709,000.00	100.00
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,014,260,000.00	1,001,545,000.00	98.75
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,914,769,581.00	1,627,423,674.00	84.99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,914,769,581.00	1,627,423,674.00	84.99
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	98,301,000.00	98,286,000.00	99.98
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	226,056,300.00	129,414,300.00	57.25
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	191,592,650.00	171,344,250.00	89.43
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	451,642,500.00	377,977,839.00	83.69
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	327,312,676.00	238,443,270.00	72.85
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	90,479,393.00	90,479,393.00	100.00
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99,464,462.00	98,844,462.00	99.38
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104,976,550.00	102,781,550.00	97.91
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	122,502,000.00	121,162,000.00	98.91
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	78,692,000.00	77,621,720.00	98.64
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	24,190,000.00	24,100,000.00	99.63
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	99,560,050.00	96,968,890.00	97.40
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	3,610,514,025.00	3,583,542,880.00	99.25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,353,229,575.00	2,327,098,430.00	98.89
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	46,106,550.00	46,106,550.00	100.00
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46,106,550.00	46,106,550.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380,171,605.00	379,518,186.00	99.83
	- PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120,000,000.00	119,678,000.00	99.73
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260,171,605.00	259,840,186.00	99.87
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,654,841,420.00	1,636,728,679.00	98.91
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490,004,920.00	488,003,679.00	99.59
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,336,500.00	325,575,000.00	99.77
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838,500,000.00	823,150,000.00	98.17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272,110,000.00	264,745,015.00	97.29
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	89,150,000.00	82,985,015.00	93.08
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182,960,000.00	181,760,000.00	99.34
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,257,284,450.00	1,256,444,450.00	99.93
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,257,284,450.00	1,256,444,450.00	99.93
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	940,260,000.00	939,670,000.00	99.94
	- Penagihan Pajak Daerah	317,024,450.00	316,774,450.00	99.92

1	2	3	4	5
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	354,417,113.42	352,561,690.00	99.48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237,317,113.42	237,317,113.42	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86,981,000.00	86,890,000.00	99.90
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86,981,000.00	86,890,000.00	99.90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130,424,763.42	129,187,118.00	99.05
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,397,650.00	15,389,928.00	99.95
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,027,113.42	113,797,190.00	98.93
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677,355,261.00	662,947,242.00	97.87
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,655,261.00	117,247,242.00	89.06
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545,700,000.00	545,700,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,090,000.00	146,935,205.00	97.90
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	27,800,000.00	24,695,705.00	88.83
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122,290,000.00	122,239,500.00	99.96
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	270,450,000.00	268,275,000.00	99.20
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	270,450,000.00	268,275,000.00	99.20
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	153,350,000.00	151,750,000.00	98.96
	- Penagihan Pajak Daerah	117,100,000.00	116,525,000.00	99.51
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1,045,788,037.00	1,016,196,487.00	97.17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	686,998,037.00	657,561,487.00	95.72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153,192,985.00	152,775,000.00	99.73
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153,192,985.00	152,775,000.00	99.73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65,175,052.00	59,827,216.00	91.79
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,657,250.00	1,625,000.00	98.05
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,517,802.00	58,202,216.00	91.63
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,430,000.00	369,917,762.00	94.02
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,800,000.00	113,995,762.00	95.16
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,130,000.00	6,122,000.00	99.87
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,500,000.00	249,800,000.00	93.38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,200,000.00	75,041,509.00	99.79
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	37,700,000.00	37,541,509.00	99.58
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	358,790,000.00	358,635,000.00	99.96
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	358,790,000.00	358,635,000.00	99.96
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	218,470,000.00	218,375,000.00	99.96
- Penagihan Pajak Daerah	140,320,000.00	140,260,000.00	99.96	

1	2	3	4	5	
5	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	877,816,550.00	801,762,506.00	91.34	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	679,766,550.00	615,112,506.00	90.49	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126,098,000.00	126,040,000.00	99.95	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126,098,000.00	126,040,000.00	99.95	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57,948,932.00	54,113,100.00	93.38	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,163,942.00	5,000,000.00	96.83	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,784,990.00	49,113,100.00	93.04	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261,566,618.00	217,625,596.00	83.20	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,666,618.00	83,380,596.00	83.66	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,700,000.00	6,745,000.00	87.60	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154,200,000.00	127,500,000.00	82.68	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,153,000.00	217,333,810.00	92.82	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	114,300,000.00	102,533,810.00	89.71	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119,853,000.00	114,800,000.00	95.78	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	198,050,000.00	186,650,000.00	94.24	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	198,050,000.00	186,650,000.00	94.24	
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	98,650,000.00	87,500,000.00	88.70	
	- Penagihan Pajak Daerah	99,400,000.00	99,150,000.00	99.75	
	6	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	1,427,179,189.88	1,209,747,147.00	84.76
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,015,975,689.88	922,321,647.00	90.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		162,789,000.00	123,410,000.00	75.81	
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		162,789,000.00	123,410,000.00	75.81	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		92,618,120.00	91,405,625.00	98.69	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		92,618,120.00	91,405,625.00	98.69	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		637,718,569.88	605,092,360.00	94.88	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		115,317,000.00	98,527,360.00	85.44	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13,601,569.88	10,565,000.00	77.67	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		508,800,000.00	496,000,000.00	97.48	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122,850,000.00	102,413,662.00	83.36	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		59,000,000.00	41,613,662.00	70.53	
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		63,850,000.00	60,800,000.00	95.22	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		411,203,500.00	287,425,500.00	69.90	
Pengelolaan Pendapatan Daerah		411,203,500.00	287,425,500.00	69.90	
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		305,753,500.00	189,625,500.00	62.02	
- Penagihan Pajak Daerah		105,450,000.00	97,800,000.00	92.75	

1	2	3	4	5
7	UPT Pendapatan Wilayah VI Bangkep	824,715,402.00	742,450,561.00	90.03
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	598,615,402.00	516,350,561.00	86.26
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192,176,823.00	188,880,000.00	98.28
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192,176,823.00	188,880,000.00	98.28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141,467,680.00	137,560,250.00	97.24
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,070,410.00	4,000,000.00	65.89
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,397,270.00	133,560,250.00	98.64
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,420,899.00	150,348,498.00	87.20
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,120,899.00	45,048,498.00	72.52
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	-	#VALUE!
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,300,000.00	105,300,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,550,000.00	39,561,813.00	42.75
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	48,700,000.00	29,706,813.00	61.00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,850,000.00	9,855,000.00	22.47
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	226,100,000.00	226,100,000.00	100.00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	226,100,000.00	226,100,000.00	100.00
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	117,000,000.00	117,000,000.00	100.00
	- Penagihan Pajak Daerah	109,100,000.00	109,100,000.00	100.00
8	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-Toli	1,112,699,956.16	1,104,724,872.00	99.28
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	711,963,956.16	704,126,872.00	98.90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121,247,193.16	119,550,900.00	98.60
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121,247,193.16	119,550,900.00	98.60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69,109,485.00	68,403,569.00	98.98
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,109,485.00	68,403,569.00	98.98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,071,778.00	280,587,750.00	99.12
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,871,778.00	105,387,750.00	97.70
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175,200,000.00	175,200,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,535,500.00	235,584,653.00	98.76
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	82,000,000.00	79,098,153.00	96.46
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156,535,500.00	156,486,500.00	99.97
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400,736,000.00	400,598,000.00	99.97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	400,736,000.00	400,598,000.00	99.97
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	207,493,000.00	207,389,000.00	99.95
	- Penagihan Pajak Daerah	193,243,000.00	193,209,000.00	99.98

1	2	3	4	5
9	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	822,778,307.00	585,243,561.00	71.13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	708,897,507.00	474,462,561.00	66.93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188,789,998.00	132,757,000.00	70.32
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188,789,998.00	132,757,000.00	70.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23,379,636.00	20,427,445.00	87.37
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,379,636.00	20,427,445.00	87.37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439,567,873.00	268,816,077.00	61.15
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,600,000.00	2,858,686.00	79.41
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,767,873.00	36,133,641.00	41.64
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349,200,000.00	229,823,750.00	65.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,160,000.00	52,462,039.00	91.78
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	27,800,000.00	23,229,639.00	83.56
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,360,000.00	29,232,400.00	99.57
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	113,880,800.00	110,781,000.00	97.28
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	113,880,800.00	110,781,000.00	97.28
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	41,092,800.00	38,011,000.00	92.50
	- Penagihan Pajak Daerah	72,788,000.00	72,770,000.00	99.98
10	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una	970,431,399.00	961,073,580.00	99.04
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	587,641,399.00	579,733,580.00	98.65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,183,000.00	95,725,000.00	98.50
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,183,000.00	95,725,000.00	98.50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49,772,399.00	47,760,325.00	95.96
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,037,372.00	3,024,000.00	99.56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,735,027.00	44,736,325.00	95.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,050,000.00	307,262,459.00	99.10
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,280,000.00	116,562,459.00	97.72
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,670,000.00	8,600,000.00	99.19
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182,100,000.00	182,100,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,636,000.00	128,985,796.00	98.74
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	25,650,000.00	24,095,796.00	93.94
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104,986,000.00	104,890,000.00	99.91
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	382,790,000.00	381,340,000.00	99.62
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	382,790,000.00	381,340,000.00	99.62
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	190,990,000.00	189,865,000.00	99.41
	- Penagihan Pajak Daerah	191,800,000.00	191,475,000.00	99.83

1	2	3	4	5
11	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	1,009,474,390.50	1,007,064,245.00	99.76
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	749,787,773.50	748,152,945.00	99.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,200,000.00	45,080,000.00	99.73
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	45,200,000.00	45,080,000.00	99.73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91,669,087.50	91,613,674.00	99.94
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4,209,000.00	4,200,000.00	99.79
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,460,087.50	87,413,674.00	99.95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440,546,319.00	440,079,951.00	99.89
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104,246,319.00	103,795,951.00	99.57
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	2,984,000.00	99.47
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333,300,000.00	333,300,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,372,367.00	171,379,320.00	99.42
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	63,894,367.00	62,912,820.00	98.46
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108,478,000.00	108,466,500.00	99.99
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	259,686,617.00	258,911,300.00	99.70
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	259,686,617.00	258,911,300.00	99.70
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	153,200,000.00	153,025,000.00	99.89
	- Penagihan Pajak Daerah	106,486,617.00	105,886,300.00	99.44
12	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	1,577,323,714.00	1,337,727,594.00	84.81
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,162,408,714.00	1,023,204,934.00	88.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,721,750.00	6,642,750.00	98.82
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	6,721,750.00	6,642,750.00	98.82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389,971,406.00	345,672,495.00	88.64
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	31,723,450.00	31,407,669.00	99.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	358,247,956.00	314,264,826.00	87.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638,885,558.00	570,429,969.00	89.29
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171,285,558.00	163,259,969.00	95.31
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,200,000.00	8,400,000.00	68.85
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455,400,000.00	398,770,000.00	87.56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126,830,000.00	100,459,720.00	79.21
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	48,750,000.00	26,554,720.00	54.47
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78,080,000.00	73,905,000.00	94.65
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	414,915,000.00	314,522,660.00	75.80
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	414,915,000.00	314,522,660.00	75.80
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	230,865,000.00	158,780,000.00	68.78
	- Penagihan Pajak Daerah	184,050,000.00	155,742,660.00	84.62

1	2	3	4	5
13	UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara	779,362,257.95	609,568,259.00	78.21
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	398,436,257.95	318,428,259.00	79.92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,265,000.00	63,910,000.00	90.96
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70,265,000.00	63,910,000.00	90.96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,699,557.95	43,935,150.00	62.14
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,080,237.20	0	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,619,320.75	43,935,150.00	64.03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,617,200.00	71,675,300.00	66.60
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,417,200.00	24,275,300.00	64.88
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,400,000.00	0	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67,800,000.00	47,400,000.00	69.91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149,854,500.00	138,907,809.00	92.70
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	45,750,000.00	34,907,809.00	76.30
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,104,500.00	104,000,000.00	99.90
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	380,926,000.00	291,140,000.00	76.43
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	380,926,000.00	291,140,000.00	76.43
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	236,300,000.00	169,420,000.00	71.70
	- Penagihan Pajak Daerah	144,626,000.00	121,720,000.00	84.16
14	UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut	755,520,777.38	502,449,288.00	66.50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	464,556,739.99	324,459,288.00	69.84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125,716,000.00	66,490,000.00	52.89
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125,716,000.00	66,490,000.00	52.89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,410,740.00	62,724,150.00	94.45
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,023,450.00	4,023,450.00	100.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,387,290.00	58,700,700.00	94.09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212,209,999.99	143,275,138.00	67.52
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,959,999.99	44,025,138.00	65.75
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,050,000.00	8,700,000.00	57.81
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130,200,000.00	90,550,000.00	69.55
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,220,000.00	51,970,000.00	86.30
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	39,500,000.00	31,250,000.00	79.11
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,720,000.00	20,720,000.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	290,964,037.39	177,990,000.00	61.17
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	290,964,037.39	177,990,000.00	61.17
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	193,444,933.30	154,990,000.00	80.12
	- Penagihan Pajak Daerah	97,519,104.09	23,000,000.00	23.59

Berdasarkan data table diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Capaian terbesar ada pada UPT Pendapatan Wilayah X Donggala dengan Capaian sebesar 99,76% dimana Capaian Sub Belanja Kegiatan pada belanja jasa pelayanan umum kantor sebesar 100% atau seluruhnya terealisasi dan capaian terendahnya pada sub belanja penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan PSK dan Perizinan kendaraan dinas operasional sebesar 98,46%. Sedangkan Realisasi Capaian terendah terdapat pada UPTD Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut dimana nilai Capaiannya hanya sebesar 66,50% dengan capaian tertinggi pada sub belanja Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sedangkan capaian terendahnya pada sub belanja Penagihan Pajak Daerah yang hanya tercapai sebesar 23,59%.

Selanjutnya, dari tabel tersebut terlihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi lebih besar terealisasi capainnya di banding dengan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan rata-rata capaian sub belanja tertinggi hingga 100% terdapat pada capaian sub belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.3 INOVASI



Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 dalam upaya peningkatan PAD khususnya Peningkatan Pajak Daerah adalah pelaksanaan Program **“BERANI BEBASKAN TUNGGAKAN PKB”**. Program ini merupakan **Insentif Pajak Kendaraan Bermotor** sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pembebasan dalam berbagai jenis kewajiban pajak kendaraan bagi Masyarakat yang meliputi Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor 100%, Bebas Pokok Tunggakan PKB Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II) dan Bebas Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan **“BERANI BEBASKAN TUNGGAKAN PKB”** di tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 14 April s/d 14 Mei 2025 sebagai bentuk Apresiasi Kepada Masyarakat pada HUT Sulteng ke-61 dan pada 19 November s/d 20 Desember 2025.



Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pembebasan dalam berbagai jenis kewajiban pajak kendaraan bagi masyarakat.



BERANI BEBASKAN TUNGGAKAN PKB
Keppub Nomor : 900.1.13.1/083/BAPENDA-G.ST/2025
berlaku 14 April s/d 14 Mei 2025



BERANI BEBASKAN TUNGGAKAN PKB
Keppub Nomor : 900.1.13.1/421/BAPENDA-G.ST/2025
berlaku 19 November s/d 20 Desember 2025

3.4 PENGHARGAAN



PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PENGANUGERAHAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PREDIKAT "PELAYANAN PRIMA"

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 meraih Predikat Informatif dengan nilai 92,2. sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

2. INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PEKPPP NASIONAL TAHUN 2025



Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 659 Tahun 2024 tentang hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional oleh Kemenpan RB, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke-11 (sebelas) dengan IPP 4,34 Kategori A- (Sangat Baik) dengan 3 (tiga) Locus

Evaluasi yakni :

1. Bapenda melalui Samsat Wilayah XI Sigi : IPP 4,59 Kategori A (Pelayanan Prima)
2. Dinas Sosial : IPP 4,46 Kategori A- (Sangat Baik)
3. RSUD Undata : IPP 3,97 Kategori B (Baik)

Dari data tersebut, Unit Samsat Wilayah XI Sigi menempati posisi tertinggi dibanding unit lainnya, sehingga Unit Bapenda Sulawesi Tengah menerima penghargaan oleh Menteri PAN RB Republik Indonesia sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat “**Pelayanan Prima**” pada PEKPPP Nasional Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disetiap tahunnya dalam melakukan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah dan secara operasional melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di samping itu mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penyerapan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan organisasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan yang dilakukan baik di Badan maupun di UPT pengelola pendapatan.

Secara umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat di kategorikan **Baik** dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari pencapaian target indikator kinerja yang terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terhadap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebesar 107,3% kategori Sangat Tinggi.
2. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.4.950.524.910.533,26,-
3. serta Realisasi Penyerapan DPA T.A. tahun 2025 dari alokasi anggaran sebesar Rp.117.212.094460,51 yang terealisasi sebesar Rp. 107.663.895.309 atau 91,85%.

B. KENDALA DAN UPAYA KEDEPANNYA

1. Pajak Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mencapai 81,79%. secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2024, capaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024

sebesar 27,12%. Namun, yang perlu diketahui bahwa target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.451.500.000.000. dari sebelumnya senilai Rp. 1.629.000.000.000 menjadi Rp.2.080.500.000.000.

Target penerimaan Pajak daerah sebesar Rp. 2.080.500.000.000 di tahun 2025 hanya terealisasi sebesar Rp. 1.701.581.912.900,73 atau sebesar 81,79% sehingga dikategorikan tidak mencapai target 100% hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala ditahun 2025 dan akan dilakukan beberapa Upaya kedepannya sepanjang tahun 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

KENDALA

- belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan kecenderungan masyarakat yang masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia
- Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan bermotor dikarenakan minimnya kesadaran kepatuhan wajib pajak
- kurangnya kesepakatan bersama para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan terkait pemungutan pajak daerah

UPAYA

- implementasi "BERANI BEBASKAN TUNGGAKAN PKB" sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PKB di setiap tahunnya
- menyusun Inovasi Pelayanan "BERANI UMROH GRATIS" untuk masyarakat yang taat bayar pajak kendaraan
- Monev secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh UPTD Bapenda
- pelaksanaan kegiatan Razia gabungan dan ATT dengan melibatkan peran serta Massa/Media Sosial secara Massif

2. Retribusi Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 mencapai 54,99%. secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2024, capaian realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 59,03%. Namun, yang perlu diketahui bahwa target Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.35.165.321.370 dari sebelumnya senilai Rp. 17.100.594.800 menjadi Rp. 52.265.916.170.

Target Retribusi daerah sebesar Rp. 52.265.916.170 di tahun 2025 hanya terealisasi sebesar Rp. 28.740.924.020 atau sebesar 54,99% sehingga dikategorikan tidak mencapai target 100% hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala ditahun 2025 dan

akan dilakukan beberapa Upaya kedepannya sepanjang tahun 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

KENDALA

- adanya beberapa objek retribusi yang digunakan oleh instansi pemerintahan yang menyebabkan dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi

UPAYA

- pengembangan dan penyempurnaan Retribusi secara Online sebagai sarana pemungutan retribusi melalui Perluasan Kanal Pembayaran Retribusi dan Pengintegrasian Sistem Pendukung Pemungutan Retribusi yang dimiliki oleh PD Pemungut Retribusi
- Monitoring langsung ke PD pemungut untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2025 capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 mencapai 105,36%. secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 81,2%. Namun, yang perlu diketahui bahwa target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.162.000.000.000 dari sebelumnya senilai Rp. 212.100.000.000 menjadi Rp. 50.100.000.000.

Target Retribusi daerah sebesar Rp. 50.100.000.000 di tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 52.785.622.487 atau sebesar 105,36% sehingga dikategorikan telah mencapai target lebih dari 100%. Namun keberhasilan pencapaian target tersebut tidak luput dari berbagai kendala ditahun 2025 dan akan dilakukan beberapa Upaya kedepannya sepanjang tahun 2026.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada tahun 2025 capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 mencapai 69,51%. secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2024, capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,82 %. Namun, yang perlu diketahui bahwa target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 9.339.553.292 dari sebelumnya senilai Rp. 393.460.617.339 menjadi Rp. 402.800.170.631.

Target Retribusi daerah sebesar Rp. 402.800.170.631 di tahun 2025 hanya terealisasi sebesar Rp. 279.998.433.602,79 atau sebesar 69,51% sehingga dikategorikan tidak mencapai target 100% hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala ditahun 2025 dan akan dilakukan beberapa Upaya kedepannya sepanjang tahun 2026.

5. Secara Umum

Secara Umum pencapaian target dan realisasi kinerja di tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dikategorikan berjalan dengan BAIK namun disisi lain terdapat Hambatan yang dialami selama tahun 2025 dan diupayakan dapat diperbaiki di tahun 2026. Sebagaimana disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

➤ HAMBATAN

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Sasaran Program masih terdapat antara lain :

1. Kurang nyamannya ruangan pelayanan pembayaran pajak pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Sistem Online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT sering mengalami masalah;
3. Kurang optimalnya mobil yang digunakan untuk pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL); dan
4. Kurangnya dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

➤ UPAYA KEDEPAN

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), Gerai Samsat Corner, serta Samsat Digital dan *Drive-Thru*
 - Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

- Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker Aksi Tempel-Tempel (ATT) pada kendaraan bermotor.
 - Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPTD Pendapatan pada Badan Pendapatan.
2. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
 3. berkoordinasi dengan Stakeholder terkait baik internal maupun eksternal dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran sehingga proses pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan lebih terarah dan lancar.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ENDI ORMAN, S.STP., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19771212 199612 1 001

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI INOVASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Insentif Pajak Kendaraan Bermotor



Aplikasi SIGNAL (SAMSAT Digital Nasional)



Pelayanan SAMSAT Drive Thru



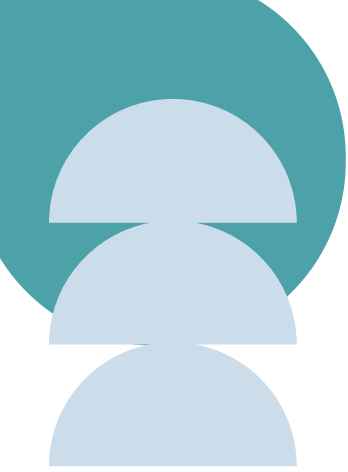
Pembayaran Non Tunai QRIS



Pemanfaatan Data Kependudukan



Samkel, ATT dan SambarMo



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2025





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

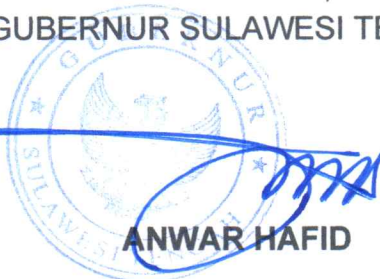
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,79%

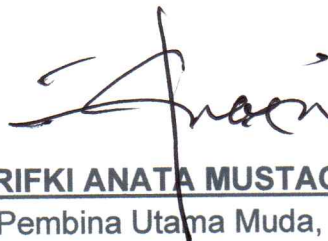
PROGRAM	ANGGARAN	KET
Badan Pendapatan Daerah		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 98.486.094.073,48	APBD
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.355.784.285,89	APBD
Jumlah	Rp. 102.841.878.359,37	APBD

Palu, 15 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. NUR, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS

MUH. NUR, S.STP., M.Si.

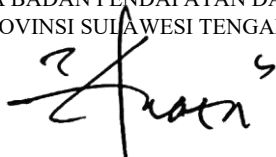
NIP. 19810303 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68
1.1	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75
1.2	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	85
1.3	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
1.4	Tersedianya ASN yang berkompeten	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
1.5	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
1.6	Tersedianya laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
1.7	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
1.8	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 86.902.187.519,32	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 293.110.837,09	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 67.890.588.748,82	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 57.440.000,00	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 217.249.300,00	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.272.520.277,08	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.014.993.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.168.506.771,00	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.664.801.385,33	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



MUH. NUR, S.STP., M.Si
 NIP. 19810303 200012 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA SETIAWATI, S.STP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUH. NUR, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
S
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS**

MUH. NUR, S.STP., M.Si.
NIP. 19810303 200012 1 001

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM**

RINA SETIAWATI, S.STP
NIP. 19850420 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50
3.	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	1
4.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6
7.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4
9.	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	1
10.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	9
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
12.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
13.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60
15.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60

16.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 39.500.000,00	APBD
2	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp. 14.638.750,00	APBD
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 109.782.350,00	APBD
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 53.328.200,00	APBD
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 125.739.191,00	APBD
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.520.041.600,08	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 206.880.000,00	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 323.741.436,00	APBD
9	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp. 799.938.000,00	APBD
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4.215.055.000,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.990.542.771,00	APBD
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 152.664.000,00	APBD
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.025.300.000,00	APBD
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 148.032.991,14	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 249.500.000,00	APBD
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 271.327.597,00	APBD
17	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 995.940.797,19	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

MUH. NUR, S.STP., M.Si.
NIP. 19810303 200012 1 001

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

RINA SETIAWATI, S.STP
NIP. 19850420 200312 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG

PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI

PENDAPATAN DAERAH

ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM

NIP. 19720718 200212 2 004

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

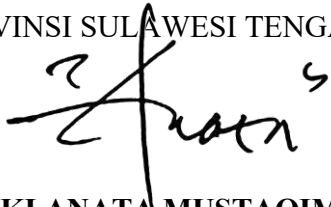
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital	100
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daaerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68
2.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Pendapatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 86.902.187.519,32	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.272.520.277,08	APBD

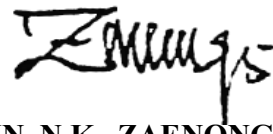
Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SISTEM
INFORMASI PENDAPATAN DAERAH



ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOFYAN, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN
DAERAH

ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM

NIP. 19720718 200212 2 004

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG
INFRASTRUKTUR, JARINGAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

SOFYAN, SH

NIP. 19720807 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR, JARINGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp. 75.000.050,00	APBD

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI
PENDAPATAN DAERAH



ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR,
JARINGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI



SOFYAN, SH
NIP. 19720807 200604 1 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVA ISMALA DEWI, SE., MM.**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan Data Dan Informasi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SISTEM
INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN
DATA DAN INFORMASI

NOVA ISMALA DEWI, SE., MM
NIP. 19770527 200801 2 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG PELAPORAN DATA DAN INFORMASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan Basis data Pajak Daerah	1

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 140.942.650,00	APBD

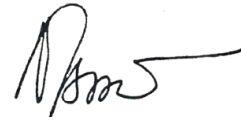
Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SISTEM
INFORMASI PENDAPATAN DAERAH



ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DATA
DAN INFORMASI



NOVA ISMALA DEWI, SE., MM
NIP. 19770527 200801 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSTAQIM KARIM, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

MUSTAQIM KARIM, SH., MM

NIP. 19711115 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

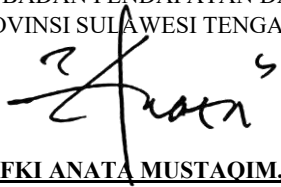
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	100
1.1	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100
2.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 86.902.187.519,32	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD
2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 322.977.200,00	APBD

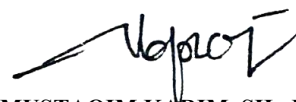
Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH



MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUSTAQIM KARIM, SH., MM**

Jabatan : Kepala Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

MUSTAQIM KARIM, SH., MM

NIP. 19711115 200701 1 020

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG PAJAK DAERAH

RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si

NIP. 19880609 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16
2.	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1
3.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1
4.	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16

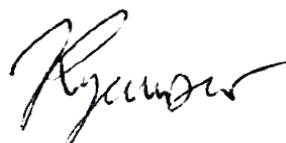
Sub Kegiatan	Anggran	Keterangan
1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 114.612.676,00	APBD
2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 53.118.000,00	APBD
3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 46.304.000,00	APBD
4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 312.046.500,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PAJAK DAERAH


MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020


RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19880609 200701 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPARDIN KAHAR, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUSTAQIM KARIM, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

MUSTAQIM KARIM, SH., MM

NIP. 19711115 200701 1 020

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG
RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN

SUPARDIN KAHAR, S.Sos

NIP. 19710801 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1
2.	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 51.110.000,00	APBD
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Rp. 138.936.350,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH



MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG
RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN



SUPARDIN KAHAR, S.Sos
NIP. 19710801 200701 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH

ABDUL RAHMAN, SH

NIP. 19770722 200212 1 005

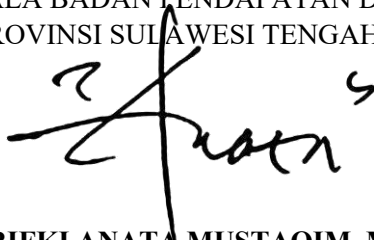
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase Pengendalian Penurunan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pendapatan	100
1.1	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1
1.1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1

Program	Anggran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

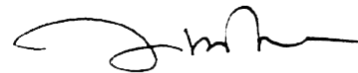


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PENDAPATAN DAERAH



ABDUL RAHMAN, SH
 NIP. 19770722 200212 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN,
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG PEMERIKSAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 65.479.393,00	APBD
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 49.464.462,50	APBD

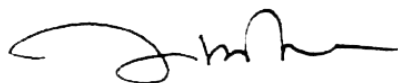
Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH

KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN,
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

.....
NIP.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GINA ANGRANI YUNUS, S.Kom., M.Si.**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN
PENDAPATAN DAERAH

GINA ANGRANI YUNUS, S.Kom., M.Si.
NIP. 19830627 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SUB BIDANG PENGENDALIAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PENDAPATAN
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

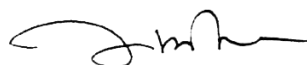
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 49.464.462,50	APBD
2. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 65.479.393,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN
PENDAPATAN DAERAH



GINA ANGRANI YUNUS, S.Kom., M.Si.
NIP. 19830627 201001 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.ss

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN

PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

PENDAPATAN DAERAH

.....

NIP.

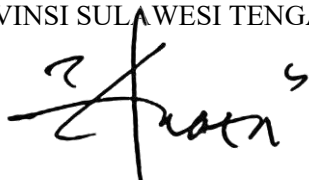
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100
2.	Meningkatnya upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD	100
2.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100
2.2	Tersedianya Regulasi dan Penyuluhan Kebijakan PAD	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 86.902.187.519,32	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Rp. 322.977.200,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.197.591.881,50	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

.....

NIP.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN DAERAH

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2
2.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 44.779.250,00	APBD
2. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 98.301.000,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG
 PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN
 DAERAH

Pihak Pertama
 KEPALA SUB BIDANG
 PERENCANAAN DAN PENETAPAN
 PENDAPATAN DAERAH

.....
 NIP.

.....
 NIP.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHDAYANI, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

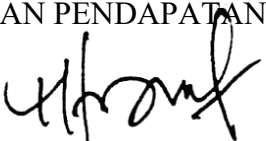
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH


WAHDAYANI, S.STP., M.Si
NIP. 19820110 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

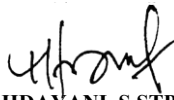
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4
2.	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1
3.	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	18
4.	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 46.951.900,00	APBD
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 41.199.700,00	APBD
3. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 126.056.600,00	APBD
4. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 104.976.550,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG
 PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN
 DAERAH

.....
 NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN
 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN
 DAERAH


WAHDAYANI, S.STP., M.Si
 NIP. 19820110 200012 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU

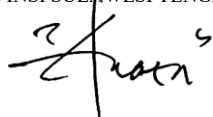
YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH I PALU
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. I Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. I Palu	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. I Palu	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. I Palu	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. I Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. I Palu	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. I Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. I Palu	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. I Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. I Palu	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. I Palu	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. I Palu	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. I Palu	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. I Palu	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.401.029.700,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 759.484.450,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 42.000.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 354.948.280,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.774.541.420,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 229.540.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 759.484.450,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM
NIP. 19750528 200904 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH I PALU

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 42.000.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 120.000.000,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 234.948.280,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 453.001.920,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 308.139.500,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.013.400.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 73.150.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 156.390.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM
NIP. 19750528 200904 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALTAR, SH., MM**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

ALTAR, SH., MM
NIP. 19850902 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH I PALU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 584.760.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH I PALU



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
 NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KASIE PKB DAN BBN-KB



ALTAR, SH., MM
 NIP. 19850902 200604 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHILMI, SE**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 15 Septemer 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

NURHILMI, SE
NIP. 19700827 199103 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH I PALU

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

SUB KEGIATAN
1 Penagihan Pajak

ANGGARAN
Rp. 174.724.450,00

KET
APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH I PALU

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
NIP. 19820926 201001 1 010



NURHILMI, SE
NIP. 19700827 199103 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWIN, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH II PARIGI MOUTONG

IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH II PARIGI MOUTONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. II Parigi Moutong	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. II Parigi Moutong	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. II Parigi Moutong	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. II Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. II Parigi Moutong	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. II Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. II Parigi Moutong	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. II Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. II Parigi Moutong	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. II Parigi Moutong	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. II Parigi Moutong	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.147.380.674,42	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 210.135.000,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 47.312.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 110.123.413,42	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 839.855.261,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 150.090.000,00	APBD
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 210.135.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH II PARIGI MOUTONG


IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHAERIL, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWIN, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH
II PARIGI MOUTONG

IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

SUHAERIL, S.Sos., MAP
NIP. 19740918 200801 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH II PARIGI MOUTONG

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 47.312.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.500.000,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 108.623.413,42	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 139.655.261,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 700.200.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 27.800.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 122.290.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH II PARIGI MOUTONG



IRWIN, SE
 NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA SUB BAGIAN
 TATA USAHA



SUHAERIL, S.Sos., MAP
 NIP. 19740918 200801 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A D H A M, S.Sos**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I R W I N, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH
II PARIGI MOUTONG WILAYAH II

I R W I N, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

A D H A M, S.Sos.
NIP. 19741019 200801 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH II PARIGI MOUTONG

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12


Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 113.035.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH II PARIGI MOUTONG



IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB



ADHAM, S.Sos
NIP. 19741019 200801 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHRUL LABUDU, S.Sos**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I R W I N, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH II PARIGI MOUTONG

I R W I N, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

SAHRUL LABUDU, S.Sos
NIP. 19700522 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH II PARIGI MOUTONG

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan
2. Penagihan Pajak

Anggaran
Rp. 97.100.000,00

Keterangan
APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH II PARIGI MOUTONG

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



IRWIN, SE
NIP. 19740411 200801 1 006



SAHRUL LABUDU, S.Sos
NIP. 19700522 200604 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH III POSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


No.	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. III Poso	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil.III Poso	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil.III Poso	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil.III Poso	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil.III Poso	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil.III Poso	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil.III Poso	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil.III Poso	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil.III Poso	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil.III Poso	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. III Poso	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. III Poso	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil.III Poso	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil.III Poso	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 732.488.587,28	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 188.440.000,00	APBD
Program	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 82.224.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 54.026.602,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 526.537.985,28	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 69.700.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 188.440.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAOIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH III POSO


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
 NIP. 19700525 199011 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IHDA LASODI, SE.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


IHDA LASODI, SE.
NIP. 19750322 200801 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH III POSO

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 82.224.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.657.250,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52.369.352,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 152.807.986,28	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 6.529.999,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 367.200.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 37.600.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 32.100.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

IHDA LASODI, SE.
NIP. 19750322 200801 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEITYWATI MBORESA, SE.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


MEITYWATI MBORESA, SE.
NIP. 19680503 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH III POSO


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1

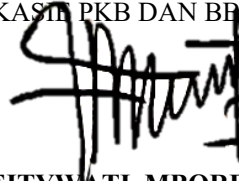
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 124.570.000,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH III POSO

PIHAK PERTAMA
 KASUB PKB DAN BBN-KB


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
 NIP. 19700525 199011 1 001


MEITYWATI MBORESA, SE.
 NIP. 19680503 200604 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAHRUN B. SAPPE, SE.**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:


1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE DAN PENAGIHAN


BAHRUN B. SAPPE, SE.
NIP. 19850714 201101 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH III POSO


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 63.870.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH III POSO


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN


BAHRUN B. SAPPE, SE.
NIP. 19850714 201101 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

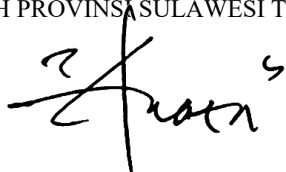
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH IV MOROWALI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IV Morowali	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil.IV Morowali	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. IV Morowali	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. IV Morowali	79
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. IV Morowali	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IV Morowali	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. IV Morowali	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IV Morowali	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. IV Morowali	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IV Morowali	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IV Morowali	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil.IV Morowali	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IV Morowali	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. IV Morowali	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 627.168.550,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 150.800.000,00	APBD

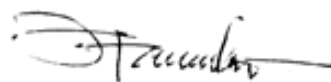
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 73.520.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 57.928.932,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 261.566.618,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 234.153.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 150.800.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH IV MOROWALI



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
 NIP. 19740824 200012 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIKHA PADANG, SH.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

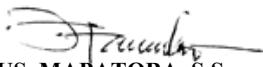
MIKHA PADANG, SH.
NIP. 19880710 201101 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH IV MOROWALI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 73.520.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.163.942,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52.764.990,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 99.666.618,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.700.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 154.200.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 114.300.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 119.853.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI


AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
 NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


MIKHA PADANG, SH.
 NIP. 19880710 201101 2 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH IV MOROWALI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 75.400.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH IV MOROWALI



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
 NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KASIE PKB DAN BBN-KB

.....
 NIP.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI YANTO M. HARIS, SE**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

HERI YANTO M. HARIS, SE
NIP. 19820401 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH IV MOROWALI

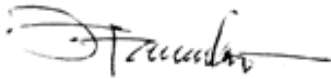
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Penagihan Pajak	Rp. 75.400.000,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IV MOROWALI

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001



HERI YANTO M. HARIS, SE
NIP. 19820401 201001 1 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI

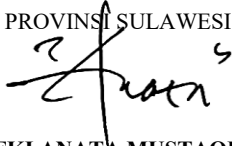
WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH V BANGGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. V Banggai	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. V Banggai	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. V Banggai	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. V Banggai	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. V Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. V Banggai	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. V Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. V Banggai	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. V Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. V Banggai	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. V Banggai	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. V Banggai	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. V Banggai	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. V Banggai	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.106.712.689,88	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 195.466.500,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 108.526.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 92.618.120,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 757.718.569,88	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 147.850.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 195.466.500,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKIANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
Pihak Pertama
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH V BANGGAI


WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
 NIP. 19700606 200701 1 030

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI AHDANIAR, SE.M.AP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

SRI AHDANIAR, SE.M.AP

NIP. 19830327 200903 2 007

PIHAK KEDUA

KEPALA UPT PENDAPATAN

WILAYAH V BANGGAI

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE

NIP. 19700606 200701 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH V BANGGAI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
3.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
4.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 108.526.000,00	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 92.618.120,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 115.317.000,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 31.601.569,88	APBD
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 610.800.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 59.000.000,00	APBD
7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 88.850.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI


WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
 NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


SRI AHDANIAR, SE.M.AP
 NIP. 19830327 200903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSNO LASANDRE, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH

NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KASIE PKB DAN BBN-KB

RUSNO LASANDRE, SH.


NIP. 19690806 200701 1 038

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH V BANGGAI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 91.502.091,50	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI


WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


RUSNO LASANDRE, SH.
NIP. 19690806 200701 1 038

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si

NIP. 19841005 201001 1 008

PIHAK KEDUA

KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE

NIP. 19700606 200701 1 030

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH V BANGGAI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 66.000.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH V BANGGAI



WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si
NIP. 19841005 201001 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 535.461.400,98	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 189.265.000,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 114.315.537,99	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 83.994.424,45	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 244.601.438,54	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 92.550.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 189.265.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAOIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN


AMELIA K. L. MAKARATE, S.STP., M.Si
NIP. 19810830 200012 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALAMSYAH, SE.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.

NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

ALAMSYAH, SE.

NIP. 19780730 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 114.315.537,99	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.789.870,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 81.204.554,45	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 107.601.438,54	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 132.000.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 48.700.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 43.850.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN


AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
 NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


ALAMSYAH, SE.
 NIP. 19780730 201001 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

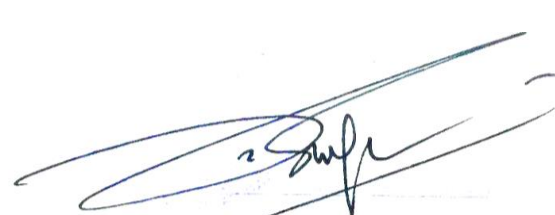
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN


AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001


SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.
NIP. 19790212 201001 1 026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN


No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 99.765.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN


AMELIA K. AMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.
NIP. 19790212 201001 1 026

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUSTINUS FERNANDO RUNTUKAHU, SE.**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

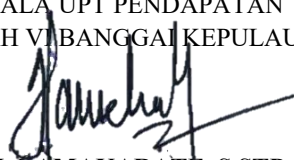
AGUSTINUS F. RUNTUKAHU, SE.
NIP. 19840804 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

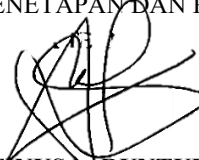
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 89.500.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN



AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



AGUSTINUS F. RUNTUKAHU, SE.
NIP. 19840804 201503 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERAWATY, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI

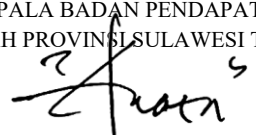
ERAWATY, SE.
NIP. 19771219 200801 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH VII TOLI-TOLI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

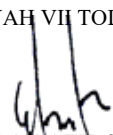
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPT Wil. VII Toli-toli	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. VII Toli-toli	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. VII Toli-toli	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. VII Toli-toli	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VII Toli-toli	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. VII Toli-toli	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VII Toli-toli	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. VII Toli-toli	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VII Toli-toli	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. VII Toli-toli	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. VII Toli-toli	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 772.463.956,16	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 215.236.000,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 80.376.949,16	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 75.364.985,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 443.390.522,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp. 173.331.500,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 215.236.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI


ERA WATY, SE.
NIP. 19771219 200801 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR HASANAH, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERAWATI, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI

ERAWATI, SE.
NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

NUR HASANAH, SE
NIP. 19800618 200804 2 001

**SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH VII TOLI-TOLI**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 80.376.949,16	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 0,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 75.364.985,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 149.390.522,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 294.000.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 45.000.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 128.331.500,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI


ERAWATI, SE.

NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


NUR HASANAH, SE

NIP. 19800618 200804 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FANDY ARISYANDI, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERAWATY, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI

ERAWATY, SE

NIP. 19771219 200801 2 010

PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

FANDY ARISYANDI, SH.

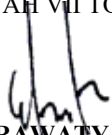
NIP. 19870713 200606 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH VII TOLI-TOLI

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 123.993.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI


ERAWATY, SE
NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


FANDY ARISYANDI, SH.
NIP. 19870713 200606 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAJEMIAH, SE., MM**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERAWATY, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI

ERAWATY, SE

NIP. 19771219 200801 2 010

NAJEMIAH, SE., MM


NIP. 19780513 200502 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH VII TOLI-TOLI


No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 91.243.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VII TOLI-TOLI


ERAWATY, SE
NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN


NAJEMIAH, SE., MM
NIP. 19780513 200502 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL

ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH VIII BUOL
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VIII Buol	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. VIII Buol	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. VIII Buol	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. VIII Buol	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. VIII Buol	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VIII Buol	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. VIII Buol	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VIII Buol	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. VIII Buol	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. VIII Buol	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VIII Buol	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. VIII Buol	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. VIII Buol	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. VIII Buol	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 685.647.509,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 62.130.800,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 165.540.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 23.379.636,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 439.567.873,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 57.160.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 62.130.800,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH VIII BUOL


ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJIS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

AJIS, S.Sos

NIP. 19690817 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH VIII BUOL

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 165.540.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. -	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 23.379.636,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.600.000,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 86.767.873,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 349.200.000,00	APBD
7. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 27.800.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29.360.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL



ZULFIKLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



A.JIS, S.Sos
NIP. 19690817 200604 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HUSEN, S.Sos**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

HUSEN, S.Sos

NIP. 19710405 200312 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH VIII BUOL

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

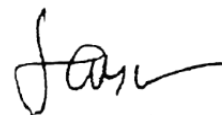
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 23.842.800,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL



ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB



HUSEN, S.Sos
NIP. 19710405 200312 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SABIHA KOROMPOT, SE.**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

SABIHA KOROMPOT, SE.

NIP. 19850309 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH VIII BUOL

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 38.288.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH VIII BUOL



ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



SABINA KOROMPOT, SE.
NIP. 19850309 201001 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIKURNIATY, SP. M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH IX TOJO UNA-UNA

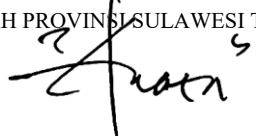
SRIKURNIATY, SP. M.Si.
NIP. 19771024 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH IX TOJO UNA-UNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

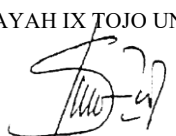
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. IX Tojo Una-una	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. IX Tojo Una-una	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IX Tojo Una-una	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IX Tojo Una-una	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. IX Tojo Una-una	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. IX Tojo Una-una	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. IX Tojo Una-una	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. IX Tojo Una-una	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 630.440.399,00	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 277.075.000,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 49.847.600,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 49.762.799,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 387.860.000,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 142.970.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 277.075.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH IX TOJO UNA-UNA


SRIKURNIATY, SP. M.Si
 NIP. 19771024 200112 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....

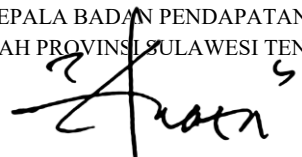
NIP.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH X DONGGALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. X Donggala	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. X Donggala	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. X Donggala	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. X Donggala	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. X Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. X Donggala	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. X Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. X Donggala	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. X Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. X Donggala	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. X Donggala	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. X Donggala	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. X Donggala	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. X Donggala	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 837.879.375,50	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 180.186.617,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 25.700.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 44.959.687,50	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 657.847.321,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 109.372.367,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 180.186.617,00	APBD

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
 NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
 KEPALA UPT PENDAPATAN
 WILAYAH X DONGGALA

.....
 NIP.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAISAL ANSHARI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

FAISAL ANSHARI, S.Sos
NIP. 19700622 200701 1 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH X DONGGALA**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 25.700.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.499.600,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 43.460.087,50	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 204.247.321,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.000.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 450.600.000,00	APBD
7. Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 39.894.367,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 69.478.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



FAISAL ANSHARI, S.Sos
NIP. 19700622 200701 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANSYAR BANGKO, S.Sos.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

ANSYAR BANGKO, S.Sos.
NIP. 19750607 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH X DONGGALA

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 103.700.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


ANSYAR BANGKO, S.Sos.
NIP. 19750607 200701 1 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARMADANI ALI, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah X Donggala
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

ARMADANI ALI, S.STP., M.Si
NIP. 19810705 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH X DONGGALA

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 76.486.617,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH X DONGGALA

.....
NIP.

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



ARMADANI ALI, S.STP., M.Si
NIP. 19810705 200112 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr. Hj. AGUSTINA D. PETTALOLO, SE., MT
NIP. 19730802 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH XI SIGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XI Sigi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. XI Sigi	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. XI Sigi	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. XI Sigi	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. XI Sigi	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XI Sigi	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. XI Sigi	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XI Sigi	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. XI Sigi	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XI Sigi	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XI Sigi	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. XI Sigi	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XI Sigi	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. XI Sigi	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 837.879.375,50	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 180.186.617,00	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 25.700.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 44.959.687,50	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 657.847.321,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 109.372.367,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 180.186.617,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI


Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT
NIP. 19730802 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI NING REJEKI, SE., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

SRI NING REJEKI, SE., MM
NIP. 19720702 200012 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH XI SIGI**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 25.700.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.499.600,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 43.460.087,50	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 204.247.321,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.000.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 450.600.000,00	APBD
7. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 39.894.367,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 69.478.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr.Hj.AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE.,MT
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


SRI NING REJEKI, SE., MM
NIP. 19720702 200012 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE, MT
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19830407 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH XI SIGI


No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 114.085.000,00	APBD
2. Penagihan Pajak	Rp. 136.460.000,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB


Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO,
 NIP. 19730802 200012 2 004


NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos., M.Si
 NIP. 19830407 201001 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUHUR, S.Sos. MM.**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE, MT
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

LUHUR, S.Sos. MM.
NIP. 19750214 200701 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH XI SIGI**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 76.486.617,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI

Dr.Hj.AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO.
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

LUHUR, S.Sos. MM
NIP. 19750214 200701 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.**
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA

NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.
NIP. 19690812 199312 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
UPT PENDAPATAN WILAYAH XII MOROWALI UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

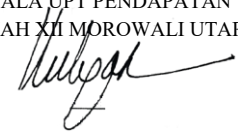
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. XII Morowali Utara	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. XII Morowali Utara	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. XII Morowali Utara	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. XII Morowali Utara	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 450.042.257,95	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 229.320.000,00	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 28.033.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 69.276.382,95	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 145.350.000,00	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 207.382.875,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 229.320.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670717 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA


NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.
NIP. 19690812 199312 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITIK FRIDA HOVANA, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA

NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.
NIP. 19690812 199312 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

TITIK FRIDA HOVANA, S.Sos.
NIP. 19770205 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH XII MOROWALI UTARA**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 28.033.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.080.237,20	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 67.196.145,75	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 76.350.000,00	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.200.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 67.800.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 45.750.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 161.632.875,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA



NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.
NIP. 19690812 199312 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



TITIK FRIDA HOVANA, S.Sos.
NIP. 19770205 200012 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISMAIL LAODE, SM**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA

NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si
NIP. 19690812 199312 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

ISMAIL LAODE, SM
NIP. 19830912 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH XII MOROWALI UTARA

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 154.617.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA



NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.
NIP. 19690812 199312 2 004

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB



ISMAIL LAODE, SM
NIP. 19830912 201001 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOHAN AGUSTINUS POKALOSE, A.Md.**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA

KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XII MOROWALI UTARA

NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si.

NIP. 19690812 199312 2 004

YOHAN AGUSTINUS POKALOSE, A.Md.

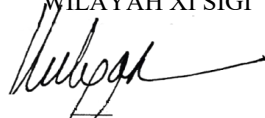
NIP. 19790801 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH XII MOROWALI UTARA

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 74.703.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XI SIGI



NURHAYATI M. LATEREY, S.Sos. M.Si
NIP. 19690812 199312 2 004

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN



YOHAN AGUSTINUS POKALOSE, A.Md.
NIP. 19790801 201001 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD RIO, SE.**
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

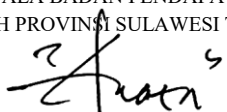
AHMAD RIO, SE.
NIP. 19760427 200801 1 010

**UPT PENDAPATAN WILAYAH XIII BANGGAI LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah UPTB Wil. XII Morowali Utara	68
1.1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase Realisasi Anggaran UPTB Wil. XII Morowali Utara	85
1.2	Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
1.3	Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
1.4	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran UPTB Wil. XII Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTB Wil. XII Morowali Utara	79
2.	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase PAD terhadap Pendapatan pada UPTB Wil. XII Morowali Utara	100
2.1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) UPTB Wil. XII Morowali Utara	Persentase Realisasi Pajak Daerah UPTB Wil. XII Morowali Utara	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 434.412.739,99	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 246.108.037,39	APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 84.412.000,00	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 66.410.740,00	APBD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 223.369.999,99	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 60.220.000,00	APBD
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 246.108.037,39	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT



AHMAD RIO, SE.
NIP. 19760427 200801 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNI ALIU, SE.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AHMAD RIO, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

AHMAD RIO, SE.

NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

ERNI ALIU, SE.

NIP. 19690923 200701 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENDAPATAN WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3
4.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
5.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 84.412.000,00	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.023.450,00	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 62.387.290,00	APBD
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 78.119.999,99	APBD
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.050.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 130.200.000,00	APBD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 39.500.000,00	APBD
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.720.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

AHMAD RIO, SE.
NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

ERNI ALIU, SE.
NIP. 19690923 200701 2 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JASNUN SAMPUKON, SE.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AHMAD RIO, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

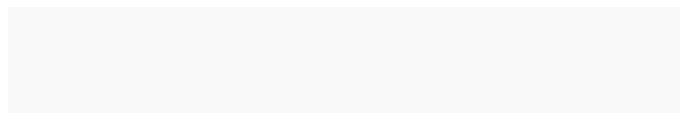
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

AHMAD RIO, SE.
NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB

JASNUN SAMPUKON, SE.
NIP. 19750925 200312 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PKB DAN BBN-KB
UPT PENDAPATAN WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 183.748.933,30	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT



AHMAD RIO, SE.
NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PKB DAN BBN-KB



JASNUN SAMPUKON, SE.
NIP. 19750925 200312 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASITAH, SE.**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AHMAD RIO, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT

AHMAD RIO, SE
NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN

MASITAH, SE.
NIP. 19760818 200604 2 031

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH XIII BANGGAI LAUT**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp. 62.359.104,09	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT


AHMAD RIO, SE
NIP. 19760427 200801 1 010

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA
KASIE PENETAPAN DAN PENAGIHAN


MASITAH, SE.
NIP. 19760818 200604 2 031